

LAPORAN PENELITIAN



KAJIAN FASILITASI PRODUKSI DAN HARGA KARET DI KABUPATEN BALANGAN

KERJASAMA

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH (BALITBANGDA)
KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

2017

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Kajian Fasilitasi Produksi dan Harga Karet di Kabupaten Balangan
2. Lokasi : Kabupaten Balangan
3. Penanggung Jawab : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) ULM
4. Ketua Peneliti
 - a. Nama : Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE, M.Si
 - b. Jabatan/Pangkat/Golongan : Guru Besar/Pembina/IVa
 - c. Alamat Instansi : Jl. Brigjen Hasan Basri Banjarmasin
Telp. (0511) 3302789
5. Anggota Peneliti :
 1. Dr. Udiantoro, S.P., M.Si
 2. Dr. Ir. M. Anshar Nur, MM
 3. Dr. Kadir, Drs., M.Si., Ak., CA
 4. Dra. Ec. Hj. Nur Fatiah, M.Si., Ak., CA
 5. Dr. Nasruddin, M.Sc
 6. Doni Stiadi, S.Si., M.Si
6. Lembaga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ULM
7. Sumber Dana : DIPA Anggaran Balitbangda Kabupaten Balangan
8. Periode Pelaksanaan : Tahun Anggaran 2017

Banjarmasin, Desember 2017

MENGETAHUI/MENYETUJUI:

Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat ULM

Ketua Peneliti

Prof. Dr. Ir. H. M. Arief Soendjoeto, M.Sc
NIP.19600623 198801 1 001

Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE, M.Si
NIP.19671231 199512 1 002

MENGETAHUI/MENYETUJUI:

Kepala Balitbangda
Kabupaten Balangan

Pejabat Pembuat Komitmen
Balitbangda Kabupaten Balangan

Akhriani, S.Pd, M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

Amirul, S.Hut., MP
NIP.19700823 199803 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim Peneliti mampu merampungkan seluruh rangkaian kegiatan penelitian yang ditandai dengan tersusunnya hasil kajian dalam bentuk Laporan Akhir. Terwujudnya penelitian ini tidak terlepas dari dukungan penuh Pemerintah Daerah kabupaten Balangan terutama Balitbangda Kabupaten Balangan, demikian pula halnya dengan Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat, serta Instansi terkait di Kabupaten Balangan yaitu Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan Dinas Koperasi, UMKM yang memfasilitasi pengumpulan data sekunder dan informasi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Berkenan dengan hal tersebut, selayaknyalah kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Balangan, demikian pula Bapak Kepala Balitbangda Kabupaten Balangan beserta seluruh jajarannya dan bahkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Ketua LPPM ULM, yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim Peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian ini. Semoga seluruh bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada kami mendapatkan limpahan pahala dari Allah SWT, Amin Ya Rabbal Alamin. Secara khusus kami sampaikan pula bahwa Tim Peneliti merasa puas atas selesainya kegiatan penelitian ini, terutama dengan apresiasi yang sangat baik dari tim Balitbangda Kabupaten Balangan yang mendorong dan memfasilitasi pengumpulan data yang berkaitan dengan kegiatan penelitian ini.

Selanjutnya Tim peneliti menyadari sepenuhnya bahwa kami sebagai manusia biasa tentu saja tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan kehilafan dalam melaksanakan proses penelitian ini. Selayaknyalah pada kesempatan ini pula, kami sepatutnya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami segenap Tim Peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, menaruh harapan besar agar kiranya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan pembangunan sektor perkaretan dari hulu sampai ke hilir demi meningkatkan kesejahteraan petani karet di Kabupaten Balangan.

Banjarmasin, Desember 2017

Tim Peneliti

RINGKASAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini yang berjudul "**Kajian Fasilitas Produksi dan Harga Karet di Kabupaten Balangan**" secara umum adalah untuk mengetahui permasalahan produksi dan pemasaran karet yang dihasilkan petani berupa bahan olahan karet alam rakyat (bokar). Adapun tujuan secara khusus adalah untuk 1) Mengetahui dan menganalisis rantai distribusi pemasaran karet alam dari petani sampai ke pabrik pengolahan, 2) Mengetahui dan menganalisis biaya-biaya baik biaya pokok maupun biaya operasional pengelolaan karet alam rakyat sebagai dasar penentuan harga karet alam di tingkat petani, dan 3) Menidentifikasi serta menganalisis harga karet yang ada selama ini pada tingkat petani dan harga karet yang disuplai ke industri pengolahan.

Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi ril produksi karet dan pemasarannya di Kabupaten Balangan. Data Primer diperoleh dari masyarakat secara langsung berdasarkan hasil pengamatan, observasi, wawancara, dialog dan monolog *focus group discussion* dengan petani, pengumpul, dan UPPB, serta instansi terkait. Data sekunder diperoleh dari instansi atau SKPD terkait terutama Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan Dinas Koperasi, UMKM, serta data sekunder lainnya yang mendukung penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran karet di Kabupaten Balangan melalui pedagang perantara yaitu pedagang pengumpul kecil, pengumpul dengan mobil dan pedagang besar, pada berbagai kisaran harga. Disamping itu, juga membentuk wadah yang disebut Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar. Harga jual bokar di tingkat petani karet masih lebih rendah dari biaya produksi yang seharusnya. Margin keuntungan atau selisih harga antara harga beli di tingkat petani pada bulan September dan Oktober 2017 dengan harga jual ke pabrik pengolahan berkisar antara Rp4.978 sampai Rp5.978.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN PENELITIAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Penelitian.....	8
1.3. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Komoditas Karet.....	10
2.2. Jenis-jenis Karet.....	10
2.2.1. Karet Alam.....	10
2.2.2. Karet Sintetis.....	21
2.3. Agribisnis Karet.....	23
2.4. Harga Karet dan Faktor yang Mempengaruhinya.....	25
2.5. Pengolahan dan Pemasaran Karet.....	28
2.5.1. Pengolahan Karet.....	28
2.5.2. Pemasaran Karet.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1. Rancangan Penelitian.....	42
3.2. Lokasi dan Batasan Penelitian.....	43
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	44
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.5. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Kondisi Wilayah Penelitian.....	45
4.1.1. Lokasi.....	45
4.1.2. Luas Wilayah	46
4.1.3. Iklim.....	48
4.1.4. Tanah.....	48
4.1.5. Penduduk Kabupaten Balangan.....	48
4.1.6. Kondisi Perekonomian Kabupaten Balangan.....	50
4.1.6.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	51

4.1.6.2. Pertumbuhan Ekonomi.....	56
4.2. Profil Pelaku Usaha Tani Karet (Responden Penelitian).....	57
4.2.1. Status dan Luas Kepemilikan Lahan.....	60
4.2.2. Jumlah Kepemilikan dan Umur Pohon Karet.....	61
4.2.3. Pengalaman dan Produksi Karet.....	62
4.2.4. Karyawan dan Pendapatan Petani Karet.....	63
4.2.5. Jarak Tempat Tinggal, Frekuensi Penyadapan dan Jumlah Penghasilan Getah Pohon Karet.....	64
4.3. Perkebunan dan Rantai Distribusi Pemasaran Karet di Kabupaten Balangan.....	66
4.3.1. Rantai Distribusi Pemasaran Karet di Kabupaten Balangan.....	69
4.3.2. Identifikasi Rantai Distribusi Pemasaran.....	71
4.4. Komponen Biaya Produksi.....	75
4.4.1. Harga Karet Tingkat Petani dan Tingkat Pabrikasi Tahun 2017 di Kabupaten Balangan.....	79
4.4.2. Perhitungan Margin Tingkat Petani.....	82
4.5. Program Keberpihakan Pemerintah yang Diharapkan Petani di Kabupaten Balangan.....	85
4.6. Implikasi Penelitian.....	89
 BAB V PENUTUP.....	 91
5.1. Simpulan.....	91
5.2. Rekomendasi Kebijakan.....	92
 DAFTAR PUSTAKA.....	 94

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Proyeksi Produksi dan Pertumbuhan Karet di Indonesia Tahun 2017-2020.....	1
Tabel 2. Proyeksi Surplus/Defisit Karet di Indonesia Tahun 2017-2020.....	2
Tabel 3. Data Karet se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015..... Jenis Komoditas Perkebunan di Kabupaten Balangan.....	3
Tabel 4. Jenis Komoditas Perkebunan di Kabupaten Balangan.....	4
Tabel 5. Jumlah Responden Petani Karet.....	42
Tabel 6. Responden Stakeholder.....	43
Tabel 7. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Balangan Tahun 2016.....	47
Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, Rata-rata, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Balangan Tahun 2016.....	50
Tabel 9. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014–2016 (juta Rp).....	53
Tabel 10. PDRB Perkapita Kabupaten Balangan Tahun 2015 – 2016.....	54
Tabel 11. Perbandingan Gini Rasio Menurut Kabupaten di Kalimantan Selatan Tahun 2015.....	55
Tabel 12. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 – 2016 (persen).....	56
Tabel 13. Jenis Kelamin Responden Petani Karet Kabupaten Balangan.....	57
Tabel 14. Kelompok Usia Responden Petani Karet Kabupaten Balangan.....	58
Tabel 15. Pendidikan Formal Responden Petani Karet Kabupaten Balangan.....	58
Tabel 16. Status Perkawinan Responden Petani Karet Kabupaten Balangan.....	59
Tabel 17. Jumlah Tanggungan Keluarga (Jiwa) Responden Petani Karet Kabupaten Balangan.....	59
Tabel 18. Jenis Pekerjaan selain Petani Karet menurut Responden Petani Karet Kabupaten Balangan.....	60
Tabel 19. Status Kepemilikan Lahan Responden Petani Karet Kabupaten Balangan.....	60
Tabel 20. Luas Lahan Tanaman Karet (Ha) Responden Petani Karet Kabupaten Balangan.....	60
Tabel 21. Jumlah Pohon Tanaman Karet menurut Responden Petani Karet Kabupaten Balangan.....	61

Tabel 22.	Klasifikasi Umur Tanaman Pohon Karet (Tahun) menurut Responden Petani Karet Kabupaten Balangan.....	61
Tabel 23.	Klasifikasi Lamanya Pengalaman Responden Petani Karet Kabupaten Balangan.....	62
Tabel 24.	Jumlah Produksi Lateks per Hektar (Kg/Ha) menurut Responden Petani Karet Kabupaten Balangan.....	62
Tabel 25.	Produksi Lateks per tahun (Ton) menurut Responden Petani Karet Kabupaten Balangan.....	63
Tabel 26.	Jumlah Karyawan dalam Pengelolaan Kebun Karet menurut Responden Petani Karet Kabupaten Balangan.....	63
Tabel 27.	Klasifikasi Pendapatan Hasil Karet per bulan menurut Responden Petani Karet Kabupaten Balangan.....	64
Tabel 28.	Klasifikasi Pendapatan diluar Kegiatan Perkebunan Karet Menurut Responden Petani Karet Kabupaten Balangan.....	64
Tabel 29.	Jarak Tempat Tinggal dengan Kebun (Km) menurut Responden Petani Karet Kabupaten Balangan.....	65
Tabel 30.	Frekuensi Penyadapan Karet per Minggu menurut Responden Petani Karet Kabupaten Balangan.....	65
Tabel 31.	Frekuensi Panen Getah Karet per Minggu Menurut Responden Petani Karet di Kabupaten Balangan.....	66
Tabel 32.	Jumlah Getah per kali Panen (Kg) Menurut Responden Petani Karet Kabupaten Balangan.....	66
Tabel 33.	Luas Tanam dan Produksi Karet (Ha).....	67
Tabel 34.	Luas Tanaman dan Produksi Karet Menurut Wilayah Kecamatan di Kabupaten Balangan.....	68
Tabel 35.	Jalur distribusi Pemasaran Bokar Menurut Responden Penelitian.....	71
Tabel 36.	Jumlah UPPB di Kabupaten Balangan.....	74
Tabel 37.	Perhitungan Biaya Produksi Petani Karet (Dalam Ha Per Tahun).....	78
Tabel 38.	Harga Jual Karet Per Kg Dengan Pilihan Margin Keuntungan Bagi Petani.....	79
Tabel 39.	Harga Bokar pe Kg pada Bulan September Tahun 2017.....	79
Tabel 40.	Harga Bokar Tingkat Petani Menurut Responden yang Menjual pada Bulan September 2017 Lebih dari Rp7.000.....	80
Tabel 41.	Harga Bokar pada Bulan Oktober 2017.....	81
Tabel 42.	Harga Jual Bokar pada Tingkat Pentani yang Menjual diatas Harga Rp7.000 pada Bulan Oktober 2017.....	81
Tabel 43.	Harga Jual Bokar Bulan Januari sampai Agustus 2017.....	82
Tabel 44.	Harga Bokar yang Diharapkan Petani.....	84
Tabel 45.	Rincian Harga Bokar pada Tingkat Petani yang Diharapkan diatas Rp7.000.....	84
Tabel 46.	Tanggapan Responden Mengenai Bantuan/Fasilitas pemerintah untuk petani karet.....	85

Tabel 47.	Jenis Bantuan/fasilitas yang diharapkan masyarakat untuk kemajuan petani karet.....	86
Tabel 48.	Jenis Bantuan/Fasilitas Pemerintah Lainnya yang Diharapkan Responden.....	86
Tabel 49.	Program pemerintahan daerah untuk menjaga kesetabilan harga karet yang diharapkan masyarakat.....	87
Tabel 50.	Program yang Diharapkan Petani Karet di Kabupaten Balangan.....	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Geografis Kabupaten Balangan.....	47
Gambar 2. Volume dan Pertumbuhan Produksi Karet	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kedua penghasil karet terbesar di dunia setelah Thailand dan diurutan ketiga Malaysia. Namun seiring perkembangannya, produsen karet di dunia semakin bertambah sehingga menambah saingan pemasok karet dunia. Sebagai produsen karet terbesar kedua di dunia, jumlah suplai karet Indonesia penting untuk pasar global. Sejak tahun 1980an, industri karet Indonesia telah mengalami pertumbuhan produksi yang stabil. Kebanyakan produksi karet Indonesia (kira-kira 80 %) diproduksi oleh para petani kecil. Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan, pada tahun 2014 produksi karet di Indonesia sebanyak 3.153.186 ton dan pada tahun 2015 sebanyak 3.145.398 ton. Adapun proyeksi produksi karet di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Proyeksi Produksi dan Pertumbuhan Karet di Indonesia Tahun 2016-2020

Tahun	Produksi	Pertumbuhan
2016	3.157.785*)	-
2017	3.220.125	1,97
2018	3.282.235	1,93
2019	3.344.345	1,89
2020	3.406.455	1,86
Rata-rata pertumbuhan		1,91

*) 2016 merupakan angka data riil

Sumber: Pusdatin 2016

Tabel tersebut menunjukkan bahwa karet Indonesia diproyeksikan akan tumbuh rata-rata 1,91%. Apabila dibandingkan dengan proyeksi

konsumsi dalam negeri, maka Indonesia mengalami surplus sebagaimana pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Proyeksi Surplus/Defisit Karet di Indonesia, Tahun 2017-2020

Tahun	Produksi (Ton)	Konsumsi Dalam Negeri (Ton)	Surplus/Defisit (Ton)
2017	3.220.125	561.129	2.616.785
2018	3.282.235	583.116	2.658.996
2019	3.344.345	605103	2.699.119
2020	3.406.455	627090	2.779.365

Sumber: Pusdatin 2016

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih rendah dalam hal konsumsi karet, sehingga mengalami surplus yang tinggi. Surplus yang tinggi menyebabkan penghasilan petani karet Indonesia sangat tergantung pada naik turunnya harga ekspor karet.

Belum pulihnya perekonomian global serta permintaan karet dunia yang belum maksimal membuat harga komoditas karet dunia menunjukkan tren penurunan sepanjang 2017. Dengan jatuhnya harga karet membuat para petani karet banyak yang menelantarkan kebun karetnya karena dianggap tidak ekonomis. Sementara buruh penyadap karet juga banyak yang beralih profesi menjadi tukang bangunan karena upahnya lebih tinggi dibanding bekerja diperkebunan karet.

Perkebunan karet merupakan unggulan di Kabupaten Balangan. Tercatat di tahun 2016 luas tanaman belum menghasilkan 13.060 Ha, tanaman menghasilkan 23.701 Ha dan tanaman rusak 1.139 Ha, sedangkan produksi karet adalah 25.282 24.959 Ton. Produksi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,29%. Kecamatan dengan produksi karet terbesar adalah di Kecamatan Awayan

dan Kecamatan Paringin (BPS, 2016). Adapun data karet di Kabupaten Balangan jika dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Data Karet se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

Kabupaten/ Kota	Luas Areal (Ha)				Produk- si	Produk- tivitas	Petani (KK)
	TBM	TM	TTM/ TR	Jumlah			
Kalimantan Selatan	19.452	138.798	780	159.030	132.196	952	148.562
Tanah Laut	1.591	7.818	7	9.416	8.363	1.070	8.339
Kotabaru	1.553	3.353	0	4.907	2.152	642	5.685
Banjar	1.153	16.912	68	18.134	13.135	777	14.276
Barito Kuala	557	667	3	1.227	359	537	2.414
Tapin	1.074	10.187	164	11.425	5.211	512	9.960
Hulu Sungai Selatan	1.620	7.741	44	9.405	6.742	871	14.788
Hulu Sungai Tengah	2.367	14.164	55	16.586	14.191	1.002	28.370
Hulu Sungai Utara	150	285	20	455	255	896	1.143
Tabalong	3.968	41.640	362	45.971	48.249	1.159	36.059
Tanah Bumbu	1.564	15.094	2	16.660	14.183	940	5.660
Balangan	3.720	20.365	53	24.138	18.683	917	21.106
Banjarmasin	-	-	-	-	-	-	-
Banjarbaru	135	570	1	706	672	1.180	762

sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016

Tabel tersebut menunjukkan bahwa luas perkebunan karet di Kabupaten Balangan berada pada urutan kedua setelah Kabupaten Tabalong. Namun jika dilihat dari tingkat produktivitas karet, Kabupaten Balangan berada pada posisi kelima setelah Tabalong, Tanah Laut, HST, dan Tanah bumbu. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan tanaman karet di Kabupaten Balangan belum menunjukkan kualitas yang baik, sehingga produktivitasnya agak rendah. Sementara itu, luas sektor perkebunan di Kabupaten Balangan ditunjukkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Jenis Komoditas Perkebunan di Kabupaten Balangan

No	Jenis Komoditas	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Karet	37.900	89,59
2	Kelapa	825	1,97
3	Kelapa Sawit	2.056	4,90
4	Lada	10	0,02
5	Lainnya	1.471	3,51
	Jumlah	41.917	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Balangan, 2017

Tabel tersebut menunjukkan bahwa komoditas karet di Kabupaten Balangan merupakan komoditas perkebunan dengan areal yang paling luas yaitu 89,59% dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya seperti kelapa sawit, kelapa, lada dan lainnya. Dominannya perkebunan karet di Kabupaten Balangan berbanding lurus dengan banyak pihak yang terlibat dalam jalur tata niaga karet alam, mulai petani, tengkulak, KUD, rumah asap, pabrik pengolahan milik swasta, perusahaan pengangkutan, asosiasi pemasaran, kantor pemasaran, tempat lelang/buesa karet, eksportir, importer dan lain-lain. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam jalur tata niaga, semakin memperpanjang rantai pemasaran dan pada akhirnya pemasaran suatu produk seperti karet menjadi tidak efisien.

Secara spesifik, permasalahan pengembangan perkebunan karet di Kabupaten Balangan yaitu: a) Keterbatasan areal lahan pengembangan dan tumpang tindih lahan, b) Banyaknya tanaman karet tua dan Peremajaan yang dilakukan oleh petani belum semuanya menggunakan klon baru dan terbaik c) Rendahnya komitmen terhadap upaya peningkatan mutu hasil, d) Lokasi kebun karet rakyat masih sulit terjangkau transportasi kendaraan bermotor sehingga menghambat

pemasaran, e) SDM dalam pengelolaan agribisnis karet masih relatif rendah, f) Masih sulitnya petani dalam mengakses modal, g) Masih belum banyaknya tersedia pasar lelang karet h) Industri yang mengolah karet alam menjadi produk karet jadi masih sangat sedikit (Wardhana, dkk, 2011).

Sebagaimana diinformasikan oleh Kompasiana, harga karet rendah disebabkan karena terlalu panjangnya mata rantai distribusi tataniaga karet. Di sinilah perlu peran Pemerintah Daerah, terutama Kepala Daerah. Apakah mereka bisa melakukan terobosan baru dalam memajukan daerahnya. Semua biaya operasional, pungutan resmi atau tidak, (banyaknya sumbangan yang diminta aparat kepada pengusaha karet sering dijadikan alasan untuk memainkan harga karet) yang dikeluarkan pedagang di semua tingkatan, pada akhirnya dibebankan kepada petani.

Sementara itu untuk kualitas dan pengolahan bahan olahan karet sendiri beberapa kendala yang dihadapi oleh petani adalah: 1) Kadar air dibiarkan tinggi bahkan sering sengaja direndam dalam air, 2) Meluasnya penggunaan bahan pembeku lateks yang tidak direkomendasikan di kalangan petani antara lain pupuk TSP, tawas, gadung, perasan nanas, cuka para, 3) Terkontaminasinya bahan olahan karet dengan tanah, lumpur, pasir, tatal, serat, 4) Jenis dan ukuran bahan olahan karet yang beragam dari yang tipis hingga berbentuk bantal, dan 5) Lemahnya persatuan petani baik dalam usaha pengolahan maupun pemasaran. Ke semua hal tersebut merupakan faktor penghambat dalam upaya

memperbaiki mutu bahan olahan karet. Sehingga menimbulkan dampak yaitu: 1) Membengkaknya biaya pengolahan/pembersihan di pabrik, 2) Tambahan biaya ini, umumnya dibebankan kepada petani; lebih jauh berpotensi menurunkan daya saing produk di luar negeri, 3) Meningkatnya limbah kotoran padat & cair berpotensi mengganggu lingkungan hidup, 4) Terganggunya mutu produk karet ekspor, berpotensi merusak citra perkaretan Indonesia serta mengganggu keberlanjutan kinerja ekspor karet ke luar negeri

Menurut Tim Penulis Penebar Swadaya (2013) bahwa keberlangsungan agribisnis karet tidak terlepas dari faktor penawaran dan permintaan karet. Pada dasarnya produksi tidak termasuk penawaran, produksi dihasilkan jika ada konsumsi. Besarnya produksi harus sama dengan konsumsi. Akan tetapi, jika produksi lebih kecil dari konsumsi, hal itu merupakan suatu prospek. Jika sebaliknya maka hal ini bisa menjadi kendala pengembangannya.

Permasalahan tata niaga karet alam lebih terasa pada perkebunana rakyat karena para petani karet mempunyai posisi yang kurang menguntungkan dalam transaksi yang dilakukan di sentra-sentra produksi karet rakyat. Pengembangana agribisnis karet menjadi perlu dengan asumsi eksternal: a) permintaan karet dunia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya harga minyak, semakin mahal harga karet sintetis dan kesadaran kelestarian lingkungan semakin meningkat, b) produksi karet rakyat diperkirakan semakin meningkat sementara

Indonesia salah satu produsen terbesar karet, c) selain produksi lateks, kayu karet juga berpotensi untuk dikembangkan.

Berdasarkan hal tersebut pengembangan produksi karet di Kabupaten Balangan direncanakan dengan: a) konsistensi mengacu pada revitalisasi perkebunan b) karet diarahkan menjadi usaha agribisnis yang berbasis lateks dan kayu yang berdaya saing tinggi, c) perluasan areal namun harus tetap sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, d) peremajaan tanaman dengan klon baru, klon karet unggul dengan potensi produksi lateks lebih dari 3 ton per ha per tahun dan kayu karet yang nantinya dihasilkan 1 m³ pohon e) pencegahan alih fungsi lahan-lahan perkebunan karet ke non pertanian, f) membangun dan memperbaiki prasarana jalan yang membantu kelancaran transportasi, g) pengembangan sumberdaya manusia yang mampu mengelola dan meneruskan usaha pengembangan karet, h) perbaikan teknologi penyadapan dan pengolahan hasil i) akses permodalan melalui berbagai skim kredit termasuk pola syariah. Untuk ini perlu bantuan sertifikasi lahan petani secara masal untuk agunan j) pengembangan agribisnis hulu untuk perkebunan karet, k) pendirian pasar lelang karet di wilayah sentra, dan l) memfasilitasi kerjasama yg sinergi antara kelompok tani, pemerintah dan swasta (*public private partnership*) dalam pemasaran.

Selama ini hasil karet dipasarkan kepada pengepul, yang kemudian memasok ke pabrik di Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka masalah-masalah yang

dihadapi petani karet alam adalah 1) jalur tataniaga dari sentra produksi (petani) hingga ke unit pengolahan cukup panjang, 2) sistem ijon masih terdapat dalam tata niaga karet rakyat dan petani mempunyai posisi yang lemah terhadap tengkulak, 3) kebanyakan petani karet tidak mengerti cara penghitungan harga karet. Informasi harga hanya sepihak dari pedagang perantara saja sehingga harga jual karet rakyat sulit berkembang, bahkan mudah ditekan, 4) koperasi yang menangani tata niaga karet rakyat sering kali kalah bersaing dengan tengkulak atau pedagang, 5) koordinasi dalam transaksi jual beli antara petani karet dengan pedagang belum ada atau masih terbatas, dan 6) rendahnya mutu karet petani menyebabkan harga jual sangat rendah.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penyusunan penelitian Kajian Fasilitasi Produksi dan Harga Karet di Kabupaten Balangan adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi tata niaga karet alam pada saluran distribusi bahan olah karet (bokar) di Kabupaten Balangan. Secara lebih spesifik tujuan kajian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis rantai distribusi pemasaran karet alam dari petani sampai ke pabrik pengolahan.
2. Mengetahui dan menganalisis biaya-biaya (biaya pokok maupun biaya operasional) pengelolaan karet alam rakyat sebagai dasar penentuan harga karet alam di tingkat petani.

3. Mengidentifikasi serta menganalisis harga karet yang ada selama ini pada tingkat petani dan harga karet yang disuplai ke industri pengolahan.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penyusunan penelitian Kajian Fasilitasi Produksi dan Harga Karet di Kabupaten Balangan adalah

1. Kepada masyarakat petani karet adalah berupa informasi mengenai biaya pokok dan biaya operasional pengelolaan karet sebagai dasar penentuan kelayakan harga karet di tingkat petani. Selanjutnya dengan kajian ini diharapkan petani karet memperoleh informasi mengenai pengolahan karet yang berkualitas untuk memberikan nilai tambah dalam penjualan karet dalam bentuk bahan olahan karet rakyat (Bokar).
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Balangan adalah rekomendasi berupa pembenahan tata niaga karet rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani karet melalui kebijakan yang terkait dengan aspek peningkatan kualitas karet dan aspek pemasaran. Selanjutnya, hasil kajian ini menjadi masukan awal dalam persiapan kajian selanjutnya mengenai rencana pembangunan perusahaan daerah tentang karet alam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Komuditas Karet

Tanaman karet adalah tanaman daerah tropis. Daerah yang cocok untuk tanaman karet adalah pada zona antara 15° LS dan 15° LU, curah hujan yang cocok tidak kurang dari 2000 mm. Optimal 2500- 4000 mm/tahun. Tanaman karet tumbuh optimal di dataran rendah yaitu pada ketinggian 200 m dpl sampai 600 m dpl, dengan suhu 25° – 23° C

2.2. Jenis-Jenis Karet

Ada dua jenis karet, yaitu, karet alam dan karet sintetis. Setiap jenis karet memiliki karakteristik yang berbeda sehingga keberadaannya saling melengkapi.

2.2.1. Karet Alam

Sifat–sifat atau kelebihan karet alam yaitu:

- a. Daya elastis atau daya lentingnya sempurna.
- b. Sangat plastis, sehingga mudah diolah.
- c. Tidak mudah panas.
- d. Tidak mudah retak.

Tujuh jenis karet alam yang dikenal di pasaran yakni sebagai berikut:

1. Bahan Olah Karet

Bahan Olah Karet adalah Lateks kebun dan gumpalan lateks kebun yang didapat dari penyadapan pohon karet *Havea Brasiliensis*. Bahan olah karet ini umumnya merupakan produksi perkebunan karet rakyat, sehingga sering disebut dengan bokar (bahan olah karet rakyat). Bokar terdiri dari empat jenis yaitu:

a. Lateks Kebun

Lateks Kebun adalah getah yang didapat dari kegiatan menyadap pohon karet. Syarat-syarat lateks kebun yang baik adalah:

- Telah disaring menggunakan saringan berukuran 40 mesh.
- Bebas dari kotoran dan benda – benda lain, seperti serpihan kayu atau daun.
- Tidak bercampur dengan bubur lateks, air, atau serum lateks.
- Warna putih dan berbau khas karet segar.
- Kadar karet kering untuk mutu 1 sekitar 28% dan untuk mutu 2 sekitar 20%.

b. Sheet Angin.

Sheet Angin merupakan produk lanjutan dari lateks kebun yang telah disaring dan digumpalkan menggunakan asam semut.

Kriteria sheet angin yang baik adalah:

- Tidak ada kotoran.

- Kadar karet kering untuk mutu 1 sebesar 90% dan mutu 2 sebesar 80%.
- Tingkat ketebalan pertama 3 mm dan ketebalan kedua 5 mm.

c. Slab Tipis

Slab Tipis merupakan bahan olahan karet yang terbuat dari lateks yang sudah digumpalkan dengan asam semut. Syarat – syarat slab tipis yang baik adalah:

- Bebas dari air atau serum.
- Tidak tercampur gumpalan yang tidak segar.
- Tidak terdapat kotoran.
- Slab Tipis mutu 1 berkadar karet kering sebesar 70% dan mutu 2 memiliki kadar karet kering 60%.
- Tingkat ketebalan pertama 30 mm dan ketebalan kedua 40 mm.

d. Lump Segar

Bahan olahan karet yang bukan berasal dari gumpalan lateks kebun yang terjadi secara alamiah dalam mangkuk penampungan disebut Lump Segar. Kriteria lump segar yang baik adalah:

- Bersih dari kotoran.
- Mutu 1 berkadar karet kering 60% dan mutu 2 berkadar karet kering 50%.

- Tingkat ketebalan pertama 40 mm dan ketebalan kedua 60 mm.

Jenis-jenis karet alam olahan yang termasuk karet alam konvensional dengan standar mutunya adalah sebagai berikut:

a. *Ribbed Smoked Sheet*

Ribbed Smoked Sheet yang disingkat RSS berupa lembaran sheet yang diproses melalui pengasapan yang baik. Beberapa kelas dalam RSS sebagai berikut:

- X RSS

Merupakan karet yang benar – benar bersih, kuat, kering, bagus, dan setiap bagian mendapat pengasapan sempurna.

- RSS 1

Merupakan karet yang jika pembungkusnya terdapat jamur masih diperbolehkan, dengan catatan jamur tersebut tidak sampai masuk kedalam karetnya.

- RSS 2

Merupakan karet yang masih diperbolehkan terdapat gelembung udara dan serpihan–serpihan kayu.

- RSS 3

Merupakan karet yang diperbolehkannya terdapat cacat warna, gelembung besar atau noda – noda dari permukaan kulit tanaman karet.

- RSS 4

Merupakan karet yang diperbolehkan terdapat gelembung-gelembung udara, karet agak rekat, atau terdapat serpihan-serpihan kulit pohon asalkan tidak terlalu banyak.

- RSS 5

Merupakan karet yang paling rendah mutunya dibandingkan dengan kelas-kelas lainnya dalam kelompok RSS. Dalam kelas RSS 5 ini bintik – bintik, gelembung kecil, noda, serpihan kulit pohon, karet agak rekat, kelebihan asap, dan belum kering benar masih diperbolehkan.

b. *White Crepe Pale Crepe*

Crepe jenis ini memiliki warna putih atau muda, ada yang tebal dan ada pula yang tipis. Standar mutu dalam kelompok white crepe dan pale crepe adalah sebagai berikut :

- No. 1 X Thin White Crepe

Karet yang termasuk kelas ini harus kering, kokoh, dan warnanya putih merata. Warna yang luntur, bau asam atau tidak enak, noda, debu, pasir, minyak, atau bekas oksidasi tidak diperbolehkan.

- No. 1 Thin White Crepe

Pada kelas ini masih mentoleransi perubahan warna asalkan sangat kecil.

- No. 1 Thin Pale Crepe

Kelas ini tidak memperbolehkan adanya kelunturan, bau asam, debu, noda-noda pasir, atau benda-benda asing, dan bekas-bekas oksidasi.

- No. 2 Thin Pale Crepe

Dikelas ini karet harus dalam keadaan kering dan kokoh dengan warna lebih tua dari no 1 thin pale crepe, hanya ada belang- belang masih diperbolehkan asalkan tidak lebih dari 10%.

- No. 3 Thin Pale Crepe

Karet untuk kelas ini harus kering, kokoh, dan warnanya sedikit kekuningan. Dalam kelas ini perubahan warna menjadi sedikit lebih tua, belang- belang , atau garis- garis masih diperbolehkan.

c. Estate Brown Crepe

Sesuai dengan namanya, crepe ini memiliki warna coklat muda, biasanya diproduksi oleh perkebunan-perkebunan besar. Dibuat dari bahan-bahan yang kurang baik, seperti sisa lateks, lump, atau koagulum yang berasal dari prokoagulasi, serta scrap atau lateks kebun yang sudah kering dibidang penyadapan. Kelompok *Estate Brown Crepe* berdasarkan standar mutu adalah sebagai berikut:

- No. 1 Thin Brown Crepe

Karet kelas ini harus kering, bersih, dan berwarna coklat muda. Diperbolehkan adanya noda, benda-benda asing semacam pasir, bekas oksidasi, bau asam dan warna yang luntur.

- No. 2 Thin Brown Crepe

Kelas ini kualifikasinya sama dengan kelas no 1 thin brown crepe, perbedaannya terletak pada warnanya yang tidak harus coklat muda, tetapi coklat sedang.

- No. 3 Thin Brown Crepe

Karet kelas ini sama hampir sama dengan kelas di atasnya, warna coklat hingga coklat tua masih diperbolehkan.

d. Compo Crepe

Compo Crepe ini terbuat dari bahan lump, srup pohon, potongan-potongan sisa RSS, atau slab basah. Standar mutu *Compo Crepe* adalah sebagai berikut :

- No. 1 Compo

Dikelas ini karet harus dalam keadaan kering, bersih, dan berwarna coklat muda. Luntur, noda-noda, pasir, atau benda-benda asing, minyak dan bekas oksidasi tidak diperbolehkan.

- No. 2 Compo

Kelas ini sama dengan kelas di atasnya, perbedaannya adalah adanya coklat dan belang-belang masih biasa ditolerir.

- No. 3 Compo

Pada kelas ini kualifikasinya sama dengan no 2 compo, hanya dalam kelas ini noda-noda kulit pohon masih diperbolehkan dan warnanya dari coklat hingga coklat tua.

e. *Thin Brown Crepe Remills*

Thin Brown Crepe Remills adalah Crepe coklat yang tipis karena digiling ulang, sehingga didapat crepe dengan ketebalan yang dikehendaki.

- No. 1 Thin Brown Crepe Remills

Karet kelas ini berwarna coklat muda, kering dan bersih. Tidak terdapat noda-noda kulit pohon, lumpur, pasir, dan benda-benda lainnya serta harus bebas dari minyak, bintik-bintik dan bekas oksidasi. Belang –belang masih diperbolehkan asal dalam jumlah kecil.

- N.o 2 Thin Brown Crepe Remills

Kualifikasi secara umum sama dengan kelas di atasnya. Namun warnanya dari coklat muda sampai sedang.

- No. 3 Thin Brown Crepe Remills

Kualifikasi sama dengan kelas di atasnya, tetapi warnanya coklat sedang hingga coklat tua sedang.

- No. 4 Thin Brown Crepe Remills

Kualifikasi sama dengan kelas di atasnya. Perbedaannya terletak pada warnanya yang coklat tua sedang hingga coklat tua.

f. *Thick Blanket Crepe Ambers*

Thick Blanket Crepe Ambers adalah *Crepe Blanket* yang tebal dengan warna coklat, dan terbuat dari slab basah, sheet tanpa pengasapan, lump, dan scrap dari perkebunan besar atau kebun rakyat yang baik mutunya. Standar mutu jenis ini sebagai berikut:

- No. 2 Thick Blanket Crepe Ambers

Karet no.2 thick blanket crepe ambers harus kering dan bersih dengan warna coklat muda. Benda-benda asing seperti noda kulit kayu, pasir, lumpur, minyak, bintik-bintik, bekas panas atau oksidasi, serta warna luntur tidak diperbolehkan.

- No.3 Thick Blanket Crepe Ambers

Kualifikasinya hampir sama dengan kelas di atasnya, perbedaannya warnanya dari coklat sedang hingga coklat. Belang-belang masih ditolerir asalkan dalam jumlah tidak terlalu banyak.

- No.4 Thick Blanket Crepe Ambers

Syaratnya sama dengan kelas di atasnya. Perbedaannya hanya pada warna yaitu dari coklat hingga coklat tua.

g. Flat Bark Crepe

Flat Bark Crepe adalah karet tanah atau earth rubber, yakni crepe yang dihasilkan dari karet alam yang belum diolah, termasuk scrap tanah yang berwarna hitam. Karet ini harus kering dengan warna coklat tua sampai kehitaman dan bertekstur sedang hingga lembek. Tidak diperbolehkan adanya kelenturan, bekas panas, pasir, lumpur, dan pengepakan tidak bersih.

h. Pure Smoked Blanket Crepe

Crepe ini didapatkan dari penggilingan karet asap yang berasal dari ribbed smoked sheet, termasuk karet bongkah atau block sheet dan sisa potongannya. Standar mutunya adalah kering, bersih, kuat, liat, dan berbau karet asap yang khas. Warnanya dari coklat hingga coklat tua.

i. Off Crepe

Crepe jenis ini terbuat dari bahan- bahan sisa atau bermutu jelek, misalnya lembaran-lembaran ribbed smoked sheet yang penggilingannya tidak sempurna, busa lateks, dan bekas air cucian yang masih banyak mengandung lateks. Tidak ada standar mutu pada jenis karet ini.

2. Lateks Pekat

Berbeda dengan jenis karet lain yang berbentuk lembaran atau bongkahan, lateks pekat berbentuk cairan pekat. Pemerosesan

bahan baku menjadi lateks pekat bisa melalui pendadihan (creamed latex) atau pemusingan (centrifuged latex). Lateks pekat ini biasanya merupakan bahan untuk pembuatan barang-barang yang tipis dan bermutu tinggi.

3. Karet bongkah

Karet bongkah berasal dari karet remah yang dikeringkan dan dikilang menjadi bandela-bandela dengan ukuran yang telah ditentukan.

4. Karet Spesifikasi Teknis

Karet Spesifikasi Teknis atau crumb rubber merupakan karet yang dibuat secara khusus, sehingga mutu teknisnya terjamin yang penetapannya didasarkan pada sifat-sifat teknis. Karet spesifikasi teknis ini dikemas dalam bongkahan-bongkahan kecil dengan berat dan ukuran seragam.

5. *Type Rubber*

Type Rubber merupakan karet setengah jadi, sehingga bisa langsung digunakan oleh konsumen, seperti untuk membuat ban atau barang-barang lain yang berbahan karet alam. Tujuan pembuatan *type rubber* adalah meningkatkan daya saing karet alam terhadap karet sintetis. Karet ini juga memiliki daya campur yang baik, sehingga mudah digabungkan dengan karet sintetis.

6. Karet Reklam

Karet Reklam atau reclaimed rubber adalah karet yang didaur ulang dari karet bekas. Umumnya bekas ban mobil atau ban berjalan dipabrik-pabrik besar. Kelebihan karet reklam ini adalah daya lekatnya bagus, kokoh, tahan lama dalam pemakaian, serta lebih tahan terhadap bensin dan minyak pelumas dibandingkan dengan karet yang baru dibuat. Kelemahannya kurang kenyal dan kurang tahan gesekan.

2.2.2. Karet Sintetis

Jika karet alam dibuat dari getah pohon karet, karet sintetis atau karet buatan dibuat dari bahan baku minyak bumi. Sama dengan karet alam, karet sintetis juga terdiri dari beberapa jenis dengan sifat-sifat yang khas dari setiap jenisnya. Ada yang tahan terhadap panas, suhu tinggi, minyak, pengaruh udara, dan ada pula yang kedap gas.

1. Jenis-Jenis Karet Sintesis

Secara umum karet sintetis dibedakan menjadi dua, yaitu karet sintetis untuk kegunaan umum dan kegunaan khusus. Dinamakan untuk kegunaan umum karena sintetis ini dapat digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Ada beberapa jenis karet sintetis yang bahkan dapat menggantikan fungsi karet alam. Beberapa jenis karet sintetis untuk kegunaan umum sebagai berikut:

- **SBR atau *Styrena Butadiene Rubber***

SBR merupakan jenis karet sintetis yang paling banyak diproduksi atau digunakan SBR memiliki ketahanan kikis yang baik dengan kalor dan panas yang ditimbulkannya rendah.

- BR (Butadiene Rubber) atau PR (Polybutadiene Rubber)

BR memiliki daya lekat lebih rendah dibandingkan dengan BSR, sehingga dalam penggunaannya BR biasanya harus dicampur dengan karet alam atau BSR.

- IR atau Isoprene Rubber

Karet sintetis jenis ini memiliki banyak kemiripan dengan karet alam karena merupakan polimer isoprene. IR bahkan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan karet alam, yaitu bahannya lebih murni dan lebih mantap.

2. Karet Sintetis untuk Kegunaan Khusus

Karet Sintetis untuk kegunaan khusus ini memiliki sifat khusus yang tidak dimiliki oleh karet sintetis untuk kegunaan umum, yakni tahan terhadap minyak, oksidasi, panas atau suhu tinggi, dan kedap terhadap gas. Beberapa jenis karet untuk kegunaan khusus ini diantaranya IIR (*isobutene isoprene rubber*), NBR (*nytrile butadine rubber*), CR (*chloroprene rubber*), dan EPR (*ethylene propylene rubber*).

3. Manfaat Karet Sintetis

Disebabkan kelebihan yang tidak dimiliki karet alam, seperti tahan minyak, karet sintetis banyak digunakan untuk pembuatan pipa karet untuk minyak dan bensin, membran, seal, gasket, serta barang-barang lain yang banyak dipakai untuk peralatan kendaraan bermotor atau industri gas. Karet sintetis jenis CR yang memiliki kelebihan tahan api dimanfaatkan untuk pembuatan pipa karet, pembungkus kabel, seal, gasket, dan sabuk pengangkut. Jenis IIR yang tahan gas digunakan untuk campuran pembuatan ban kendaraan bermotor, pembalut kawat listrik, serta pelapis tangki penyimpanan minyak atau lemak. (Setiawan, D.H, dkk, 2005)

2.3. Agribisnis Karet

Sebagai sebuah sistem, agribisnis karet pada prinsipnya merupakan rangkaian dari subsistem-subsistem yang bergerak saling terkait, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Sistem agribisnis komoditas karet mempunyai empat subsistem, yaitu:

- a. Subsistem Agribisnis hulu, yaitu subsistem yang berhubungan dengan kegiatan dalam rangka menghasilkan sarana produksi bagi usaha perkebunan karet seperti bibit karet unggul, pupuk, pestisida, koagulan lateks, stimulan untuk penyadapan, dan alat serta mesin pertanian.

- b. Subsistem usaha perkebunan (*on-farm*) karet, yaitu subsistem yang berhubungan dengan penggunaan sarana produksi yang dihasilkan oleh subsistem agribisnis hulu untuk menghasilkan lateks di tingkat kebun.
- c. Subsistem agribisnis hilir karet, yaitu subsistem yang berhubungan dengan kegiatan dalam rangka mengolah lateks menjadi produk olahan setengah jadi (seperti RSS, SIR, Crepe, dan lateks pekat) maupun produk akhir (ban, alat olahraga dan kesehatan, peralatan rumah tangga, dan barang-barang jadi karet lainnya) beserta kegiatan perdagangannya. Akhir -akhir ini juga berkembang industri hilir kayu karet khususnya untuk funitur, MDF, dan pulp.
- d. Subsistem jasa penunjang yaitu subsistem yang menyediakan jasa bagi agribisnis karet seperti bank sebagai penyedia dana investasi, penelitian dan pengembangan sebagai sumber inovasi teknologi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah sebagai pengatur kelancaran jalannya sistem Agribisnis, dll.

Keempat subsistem dalam sistem agribisnis karet tersebut merupakan suatu team work, dan diharapkan setiap pelaku ekonomi yang terlibat dalam sistem agribisnis karet memiliki wawasan secara inter subsistem atau cross subsistem, sehingga keuntungan atau insentif yang ada pada suatu subsistem juga dapat ditransfer dan dinikmati pula oleh subsistem lainnya.

2.4. Harga Karet dan Faktor yang Mempengaruhinya

Karet merupakan komoditi ekspor yang mampu memberikan kontribusi di dalam upaya peningkatan devisa Indonesia. Karet merupakan kebutuhan yang vital bagi kehidupan manusia sehari-hari, hal ini terkait dengan mobilitas manusia dan barang yang memerlukan komponen yang terbuat dari karet seperti ban kendaraan, conveyor belt, sabuk transmisi, dock fender, sepatu dan sandal karet. Secara fundamental harga karet alam dipengaruhi oleh permintaan (konsumsi) dan penawaran (produksi) serta stock/cadangan. Seperti kita ketahui, beberapa waktu belakangan ini harga jual karet rakyat mengalami fluktuasi. Naik turunnya harga karet ini disebabkan karena krisis ekonomi dunia, kondisi pasar otomotif yang sangat kompetitif dan memiliki standar yang tinggi, harga minyak mentah dunia juga secara tidak langsung mempengaruhi harga karet alam, adanya spekulasi pasar, kondisi alam, dan mutu yang bervariasi. Hal ini membuat para petani resah dan banyak pengusaha ataupun petani karet yang mengalami kebangkrutan. (Anonymous, 2015).

Indonesia, Malaysia, Thailand merupakan salah satu negara penghasil karet terbesar di dunia bahkan ketiga negara tersebut dapat berperan menjadi pengendali ekspor karet yang dapat efektif untuk mendongkrak harga karet sekaligus untuk menolong petani. Sejatinnya seluruh daerah penghasil karet berinisiasi secara bersama-sama baik pemerintah pusat dan daerah serta seluruh stakeholders dibidang

perkebunan karet untuk dapat berperan dalam menentukan harga karet dunia. Bukan semata-mata ditentukan secara otonom oleh pembeli.

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga karet diantaranya:

- a. permintaan dan penawaran karet dunia,
- b. pertumbuhan ekonomi dunia,
- c. harga minyak mentah dunia,
- d. Kurs,
- e. kondisi pasar otomotif,
- f. spekulasi pasar.

Sementara berdasarkan artikel lainnya faktor yang mempengaruhi harga karet dunia adalah:

- a. **Pertumbuhan ekonomi dunia**, Pertumbuhan ekonomi yang negatif menyebabkan daya beli masyarakat menurun, kemampuan daya beli masyarakat terhadap produk-produk turunan karet lemah. dampaknya produsen menurunkan jumlah produksinya untuk menghindari kerugian,
- b. **Kondisi pasar otomotif**, sudah diketahui secara luas bahwa konsumsi terbesar karet alam dipergunakan oleh industri ban. Industri ban sendiri sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar otomotif yang kompetitif dan memiliki standar yang tinggi. Permintaan pasar terhadap ban terutama di Indonesia bisa dikatakan sangat besar, mengingat pasar otomotif di Indonesia berkembang sangat subur, terutama pabrikan Yamaha, Honda, dan pabrikan yang lain),

- c. **Harga minyak mentah dunia**, Polimer karet dapat diperoleh dari dua sumber, karet alam dan karet sintetis. Karet alam diperoleh dari tanaman karet (*Hevea brasiliensis*) adapun karet sintetis diperoleh dari polimerasi yang berbahan baku minyak bumi. Hampir setengah dari kebutuhan karet dunia disuplai dari karet sintetis, oleh sebab itu harga minyak mentah secara tidak langsung akan mempengaruhi harga karet alam.
- d. **Spekulasi pasar**. Pasar karet alam menyimpan potensi untuk memperoleh keuntungan yang menggiurkan. Jadi banyak sedikit spekulasi yang mengambil keuntungan dengan membeli karet dalam jumlah besar pada saat harga menurun tajam dan menahannya, ketika harga karet mulai merangkak naik karena suplai menurun akibat diborong spekulasi, para spekulasi mulai melepas cadangannya untuk mendapatkan keuntungan. Dengan banyaknya suplai karet karena para spekulasi melepas cadangan dalam waktu yang hampir bersamaan menyebabkan pasar dibanjiri oleh karet dan harga akan anjlok. Selain faktor lain diatas, nilai Yen terhadap dolar AS, Stok karet Jepang, serta permintaan industri ban China juga merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga karet di pasar internasional.

2.5. Pengolahan dan Pemasaran Karet

2.5.1. Pengolahan Karet

Sesuai dengan Permentan 38 Tahun 2008 tentang pedoman pengolahan dan pemasaran karet disebutkan bahwa untuk memperoleh lateks kebun sesuai baku mutu dilakukan langkah sebagai berikut:

- a. Lateks hasil penyadapan di mangkok sadap dalam jangka waktu paling lama 5 jam setelah penyadapan dikumpulkan pada wadah yang bersih dan kering.
- b. Untuk menghindari penggumpalan secara alami, gunakan bahan pengawet sesuai anjuran lembaga penelitian karet.
- c. Apabila terjadi penggumpalan segera dipisahkan dari wadah agar tidak terpengaruh secara menyeluruh.

Baku mutu lateks kebun adalah:

- a. Kadar karet kering (KKK) tidak melebihi 20%
- b. Bersih dari benda lain berupa kayu, daun atau kontaminan
- c. Berwarna putih dan berbau segar

Langkah-langkah untuk memperoleh lateks angin dilakukan sebagai berikut:

- a. Lateks yang belum mengalami penggumpalan alami (pra-koagulas) terlebih dahulu diencerkan dengan air bersih hingga kadar karet kering (KKK) menjadi 15%;

- b. Lateks yang telah diencerkan, lebih dahulu disaring dengan alat penyaring berukuran 20 mesh;
- c. Lateks yang telah disaring dimasukkan dalam bak penggumpal dan dibubuhi bahan penggumpal asam semut atau bahan penggumpal lainnya yang direkomendasikan;
- d. Lateks dalam bak penggumpal yang telah dibubuhi bahan penggumpal dibiarkan membeku selama 2 hingga 6 jam sampai terbentuk gumpalan siap digiling;
- e. Gumpalan yang diperoleh dikeluarkan dari bak penggumpal kemudian dipipihkan dengan cara menekan gumpalan menggunakan tangan atau alat lain di atas alas yang dijaga kebersihannya;
- f. Lembaran gumpalan kemudian digiling tipis dengan menggunakan mesin giling tangan (hand-mangel) polos sebanyak 4 kali, dan setiap kali menggiling jarak gigi pengatur disetel agar menghasilkan lembaran sit setebal 5 mm, kemudian digiling satu kali dengan gilingan beralur hingga diperoleh ketebalan sit 3 mm;
- g. Lembaran sit kemudian dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan bahan penggumpal yang tertinggal;
- h. Lembaran sit yang diperoleh dikeringkan dengan cara digantung di atas rak untuk diangin anginkan di udara terbuka selama paling kurang 10 hari dan tidak terkena sinar matahari langsung.

Baku mutu sit angin adalah:

- a. Bahan penggumpal yang digunakan asam semut atau bahan penggumpal lain yang direkomendasikan;
- b. Ketebalan lembaran sit untuk mutu I paling tebal 3 mm, untuk mutu II 5 mm dan untuk mutu III 10 mm;
- c. Tidak terdapat kontaminan.

Adapun langkah-langkah untuk memperoleh slab sesuai baku mutu dilakukan sebagai berikut:

- a. Slab diperoleh dengan cara mengumpulkan lateks hasil penyadapan dalam wadah dan selanjutnya dituang dalam bak penggumpal dengan ketebalan 50 mm, ditambahkan bahan penggumpal, diaduk dan dibiarkan hingga menggumpal;
- b. Gumpalan (koagulum) yang diperoleh selanjutnya dipipihkan dengan tangan atau pemukul kayu di atas yang bersih atau dengan menggunakan gilingan tangan (hand mangel), atau
- c. Menggunakan bahan dasar lump mangkok hasil penyadapan, yang dipipihkan dahulu dengan tangan atau pemukul kayu diatas alas yang bersih;
- d. Lump mangkok yang sudah dipipihkan ditata berjajar satu lapis dengan rapi dalam bak pembeku yang bersih dengan ketebalan tidak lebih 50 mm, kemudian disiram dengan lateks yang bersih dan telah dicampur dengan bahan penggumpal hingga terbungkus seluruhnya oleh lapisan lateks.

- e. Gumpalan yang telah dipipihkan berbentuk slab tipis dengan ketebalan 50 mm selanjutnya ditiriskan diatas rak selama 1-2 minggu dan dihindarkan dari sinar matahari langsung.

Baku mutu slab adalah sebagai berikut

- a. bahan dasar diperoleh dari gumpalan lump mangkok dan atau gumpalan buatan dengan bahan penggumpalan asam semut.
- b. gumpalan digiling atau dikempa untuk mengeluarkan air/serumnya.
- c. ketebalan slab mutu I paling tebal 50 mm, untuk mutu II 100 mm dan untuk mutu III 150 mm.
- d. tidak mengandung kontaminan.
- e. selama penyimpanan tidak direndam dalam air atau terkena sinar matahari langsung.

Untuk memperoleh lump sesuai baku mutu dilakukan langkah sebagai berikut:

- a. lump mangkok dipipihkan dengan tangan atau menggunakan pemukul kayu di atas alas yang bersih hingga menjadi pipih.
- b. gumpalan pipih selanjutnya digiling dengan gilingan tangan (hand mangel) polos atau menggunakan kempa khusus hingga tipis.
- c. gumpalan tipis yang dihasilkan ditiriskan dan dianginkan di atas rak selama 1-2 minggu dan tidak boleh terkena sinar matahari langsung.

Baku mutu lump adalah sebagai berikut:

- a. tidak mengandung kontaminan

- b. ketebalan lump mutu I paling tebal 50 mm, untuk mutu II 100 mm untuk mutu III 150 mm.
- c. selama penyimpanan tidak direndam dalam air atau terkena sinar matahari langsung.

Masih dalam peraturan yang sama, kelembagaan yang seharusnya dibentuk dalam pengolahan dan pemasaran bahan olahan karet adalah membentuk sebuah organisasi non formal yang berbentuk kelompok pekebun yang beranggotakan paling kurang 25 pekebun dengan susunan organisasi kepengurusan dari pekebun. Lembaga non formal tersebut disebut dengan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) yang terbentuk dari satu atau lebih kelompok pekebun. Pembentukannya didasarkan pada luasan kebun paling kurang 100 hektar dan jumlah produksi lateks paling kurang 800 kg karet kering setiap 3 hari.

Fungsi dan tugas dari UPPB adalah:

- pelayanan kegiatan teknis dan pengembangan usaha kelompok pekebun dalam pengolahan dan pemasaran BOKAR.
- memiliki kegiatan diantaranya pengembangan keterampilan penyadapan, penggunaan peralatan, pelaksanaan dan pengolahan serta pemasaran dan pengenalan baku mutu.
- pengembangan usaha berupa membangun kemitraan kerjasama penyediaan bahan penggumpal, sarana produksi, pemasaran, transportasi dan permodalan.

Selain penerapan standar dari menteri pertanian, petani juga harus memenuhi standar yang ditetapkan industri (dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-Dag/Per/7/2016 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis yang diperdagangkan). Di dalam peraturan ini dibahas mengenai Bahan olahan karet spesifikasi teknis Standar Indonesian Rubber (Bokar SIR) yang diperdagangkan kepada Industri Crumb Rubber berupa slab, lump, slab lump, ojol, sit angin (unsmoked sheet), sit asap (smoked sheet), cutting, crepe, blocked sheet atau blanket.

Bokar SIR yang diperdagangkan kepada Industri crumb rubber dalam negeri wajib memenuhi syarat teknis sebagai berikut:

- a. tidak mengandung kontaminan vulkanisat karet
- b. tidak mengandung kontaminan berat
- c. tidak mengandung kontaminan ringan lebih dari 5%
- d. menggumpal secara alami atau dengan menggunakan bahan penggumpal,
- e. bahan penggumpal yang dimaksud adalah asam semut (formic acid), asap cair, bahan penggumpal lain yang direkomendasikan lembaga penelitian karet terakreditasi

Disampaikan dalam salah satu pasal peraturan ini adalah apabila ditemukan ketidak sesuaian mutu bokar SIR pada industri crumb rubber yakni karena terdapat kandungan vulkanisat karet maka akan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha karet atau tanda daftar industri; bila

ditemukan kandungan kontaminan berat atau kontaminan lebih dari 5% maka akan diberikan sanksi pencabutan izin usaha industri dan tanda daftar industri, setelah sebelumnya disampaikan surat teguran sebanyak 3 kali dan masa tenggang masing-masing 7 hari. Dalam hal penggunaan bahan penggumpal yang tidak memenuhi ketentuan maka industri crumb rubber dikenai sanksi pencabutan izin usaha industri dan tanda daftar industri setelah sebelumnya disampaikan surat teguran sebanyak 3 kali dan masa tenggang masing-masing 7 hari.

2.5.2. Pemasaran Karet

Modal yang diperlukan untuk usahatani dapat berasal dari milik sendiri maupun dari luar usaha tani. Penyaluran modal dari luar usahatani dapat berasal dari lembaga formal maupun non formal. Hasil kerja lembaga kredit formal di daerah perdesaan dengan berbagai jenis pinjaman yang ditawarkan belum mencapai sasaran yang diharapkan. Sementara pinjaman dari lembaga non formal seperti pedagang, tuan tanah atau petani kaya, prosesnya relatif cepat, fleksible, tanpa prosedur yang rumit serta dapat memberikan pinjaman dimana dan kapan saja petani membutuhkan.

Dalam operasi usahatannya, petani akan menerima penerimaan dan pendapatan dari usaha taninya. Penerimaan usaha tani adalah perkalian antara produksi dengan harga jual. Pendapatan usaha tani

adalah selisih antara penerimaan dengan semua biaya (Soekartawi, 1995).

Tataniaga merupakan suatu usaha untuk menciptakan, mempromosikan, serta menyerahkan barang dan jasa kekonsumen akhir atau suatu macam kegiatan ekonomi yang berfungsi membawa atau menyampaikn barang dari produsen ke konsumen. Dalam perekonomian dewasa ini sebagai besar produsen tidak menjual langsung barang-barang mereka kepada konsumen akhir, begitu juga dengan konsumen. Oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya saluran Tataniaga yang akan menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen yang akan melibatkan lembaga-lembaga tataniaga seperti agen, pedagang pengumpul, pedagang pengecer, dll (Kotler, P., 2003).

Tataniaga jika ditinjau dari aspek ekonomi dikatakan sebagai kegiatan produktif karena mampu meningkatkan guna tempat, guna bentuk dan guna waktu. Dalam menciptakan guna tempat , guna bentuk dan guna waktu ini diperlukan biaya tataniaga. Biaya tataniaga ini diperlukan untuk melakukan fungsi-fungsi tataniaga oleh lembaga-lembaga tataniaga yang terlibat dalam proses tataniaga dari produsen sampai kepada konsumen akhir. Pengukuran kinerja tataniaga ini memerlukan ukuran efisiensi tataniaga (Sudyono, 2004).

Biaya tataniaga adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tataniaga. Biaya tataniaga meliputi biaya angkut, pengiriman, retribusi, dll. Besarnya biaya tataniaga ini berbeda satu sama lain disebabkan karena

macam komoditi, lokasi pemasaran, macam lembaga tataniaga dan efektifitas tataniaga yang dilakukan (Soekartawi, 1989).

Biaya tataniaga suatu produk biasanya diukur secara kasar dengan margin dan spread. Margin menyatakan perbedaan antara harga yang dibayarkan konsumen dan harga yang diterima petani. Sedangkan spread menyatakan perbedaan kedua tingkat harga antara dua tingkat pasar. Marketing margin disebut juga price spread dan jika angka-angka price spread dipersenkan terhadap harga beli konsumen maka diperoleh share margin (Sudiyono, 2004).

Selama dalam proses menyalurkan hasil akan mengalami marketing loss (kehilangan hasil). Kehilangan hasil pada tanaman perkebunan khususnya komoditi karet umumnya disebabkan oleh jarak antara kebun dan pabrik pengolahan menyebabkan kerusakan atau penurunan mutu hasil perkebunan rakyat dan juga disebabkan oleh cara dan waktu panen yang belum tepat (Anonymous, 2005).

Efisiensi tataniaga dapat diukur dengan menjumlahkan profit petani dari hasil penjualannya dengan profit middle-man (termasuk di dalamnya pedagang pengumpul desa dan kecamatan maupun agen) dibagi dengan penjumlahan biaya tataniaga dengan biaya produksi dan pemasaran hasil. Adapun kriteria efisiensi adalah jika efisiensi tataniaga lebih besar dari 1(>1) maka pasar tersebut dikatakan efisien, dan jika efisiensi tataniaga lebih kecil sama dengan 1 (≤ 1) maka keadaan pasar tersebut tidak efisien (Mustafid, 2002).

Keberadaan pedagang perantara dalam pemasaran bokar sangat diperlukan baik oleh petani karet maupun oleh industri karet remah. Bagi petani, pedagang perantara sangat diperlukan karena, dengan produksi yang dihasilkan dalam jumlah kecil dan jauhnya jarak antara petani dengan industri yang umumnya berada di ibukota provinsi, akan sangat tidak efisien bagi petani untuk langsung membawanya ke Industri. Sebaliknya bagi industri, keberadaan pedagang perantara sangat diperlukan untuk menghindari keterlambatan dan kekurangan pasokan bahan baku yang dapat menimbulkan kerugian bagi industri karet remah. Oleh karena itu, sangatlah sulit untuk menggeser posisi pedagang karena pemilik industri sangat berkepentingan dengan keberadaannya (Malian dan Jauhari, 1999).

Antara pedagang perantara, khususnya pedagang pengumpul tingkat desa, dan petani karet juga telah terbina hubungan yang sangat kuat. Para pedagang perantara umumnya merupakan orang kaya di desanya. Petani menganggap bahwa pedagang perantara adalah figur penolong, dan bukan sebagai orang yang merugikan mereka. Para pedagang selalu menjadi tumpuan harapan apabila petani mengalami kesulitan keuangan, karena tidak ada satupun lembaga keuangan pedesaan yang mampu menandingi efektivitas pedagang perantara dalam menanggulangi kesulitan petani. Sebagai imbalannya petani akan selalu setia memasok kebutuhan karet pedagang walaupun seringkali terdapat pilihan harga yang lebih baik.

Hubungan antara petani dan pedagang perantara akan berlangsung lebih erat, bila terjalin hubungan kekeluargaan antara petani dan pedagang. Ketergantungan petani yang begitu besar kepada pedagang menyebabkan petani tidak mempunyai posisi tawar yang memadai. Pinjaman uang atau kebutuhan lainnya yang sering dilakukan petani akan mendorong petani untuk masuk ke dalam hubungan patron dan klien. Scott (1989) menyatakan bahwa seorang patron adalah orang yang berada dalam posisi membantu kliennya, sedangkan seorang klien akan mengandalkan perlindungan dari seorang patron yang berpengaruh sekaligus berkewajiban menjadi anak buah yang setia dan selalu siap mengerjakan pekerjaan apa saja yang diberikan.

Di dalam lingkungan petani terdapat hubungan yang erat dengan kaum kerabatnya, karena petani saling mengenal secara pribadi. Wolf (1985) menyatakan bahwa setiap petani dengan petani lainnya mempunyai ikatan kekerabatan yang langgeng yang berlangsung selama hidup individu. Ditambahkan oleh Gode (1985) bahwa kaum kerabat tersebut besar kemungkinannya adalah keluarga sedarah yang merupakan satu kesatuan.

Kelembagaan non formal yang sering ditemukan dalam pemasaran karet rakyat adalah tengkulak atau pengijon sebagai patron. Pengijon cenderung bertindak dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat menarik empati dari klien sehingga secara perlahan akan terjadi ikatan emosional dan kekarabatan yang sangat kuat antara patron dan klien.

Akan tetapi, keterikatan yang terbentuk cenderung menguntungkan patron dan melemahkan posisi klien terutama dalam transaksi pemasaran.

Pemasaran secara umum diartikan sebagai runtutan kegiatan atau jasa yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk dari titik produsen sampai ke titik konsumen. (Azzaino, 1992; dan Anindita, 2004). Jasa dalam pengertian ini merupakan pelaksanaan fungsi pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan nilai guna bentuk, waktu, tempat dan/atau pemilikan (possession) agar dapat memenuhi preferensi konsumen.

Bentuk kegiatan dalam pelaksanaan fungsi pemasaran tersebut dapat berupa transportasi, pengolahan, penyimpanan, sortasi dan pengepakan yang semuanya akan dapat meningkatkan nilai tambah dari produk. Nilai tambah, dalam istilah pemasaran disebut dengan margin pemasaran, dibentuk oleh biaya pemasaran akibat pelaksanaan fungsi pemasaran dan keuntungan yang diambil oleh lembaga yang melaksanakan fungsi pemasaran tersebut. Besaran margin pemasaran seringkali dikaitkan dengan efisiensi pemasaran. Margin pemasaran yang besar pada umumnya disebabkan oleh saluran pemasaran yang panjang dan oleh karena itu cenderung mengindikasikan pemasaran tidak efisien.

Mubyarto dan Dewantara (1991) mengemukakan bahwa pemasaran pertanian di Indonesia merupakan bagian yang paling lemah dalam mata rantai perekonomian. Oleh karena lemahnya pemasaran pertanian tersebut, maka ada kecenderungan bahwa pemasaran produk-produk pertanian relatif kurang efisien. Azzaino (1982) menyatakan bahwa

untuk melihat apakah sistem pemasaran telah berjalan dengan efisien dapat digunakan pendekatan analisis margin pemasaran dan analisis bagian harga yang diterima petani produsen.

Produktivitas dan kualitas karet yang dihasilkan petani karet, tidak terlepas dari sistem pemasaran karet yang dihadapi petani. Hasil penelitian Napitupulu (2004) menunjukkan bahwa sistem pemasaran karet yang didalamnya terdapat sejumlah lembaga pemasaran baik yang berperan sebagai pembeli dan penjual maupun agen komisi (kaw puik) di wilayah Provinsi Jambi menyebabkan bagian harga yang diterima petani produsen adalah sebesar 38% dari harga f.o.b. Rendahnya bagian harga yang diterima petani produsen tersebut menyebabkan petani produsen menjadi kurang termotivasi untuk menghasilkan produksi karet dengan kualitas yang lebih baik.

Sistem pemasaran bokar dapat dikatakan berperilaku sama hampir di seluruh sentra produksi karet dan telah terbangun semenjak budidaya karet dikembangkan di Indonesia. Sunaryo (2002) menemukan bahwa terdapat tiga hingga empat tingkatan pedagang yang berpartisipasi dalam transaksi bokar di Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah yakni toke (pemilik kebun), pedagang pengumpul desa, pedagang besar kabupaten dan industri karet remah. Saluran pemasaran bokar yang panjang tersebut semakin tidak mampu memberikan sistem pemasaran yang efisien dengan hadirnya para agen komisi yang menjadi perantara

dalam setiap mata rantai pemasaran yang ada (Marpaung, 1998; Nancy, 1988; Saleh, 1991; Sunaryo, 2002; Hendratno dan Gunawan, 1996).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian dilaksanakan secara deskriptif dengan metode survei terhadap pelaku usaha karet rakyat (petani karet alam dan pedagang) yang dilaksanakan secara *purposive sampling* pada wilayah kecamatan dengan pertimbangan pada luas areal kebun karet rakyat (Tertinggi, Menengah dan Terendah). Fokus penelitian pada 2 (dua) aspek yaitu aspek rantai pemasaran karet rakyat dan aspek rata-rata harga karet yang diterima petani dan harga karet yang wajar pada tingkat petani di Kabupaten Balangan dengan jumlah 150 responden.

Tabel 5. Jumlah Responden Petani Karet

No	Kecamatan	Jumlah Responden (Jiwa)	Kebun
1	Awayan	54	Tinggi
2	Batu Mandi	50	Tinggi
3	Juai	24	Menengah
4	Paringin Selatan	22	Rendah
	Total	150	

Sumber: BPS Kabupaten Balangan Tahun 2017

Penyusunan kebijakan fasilitasi produksi dan harga karet di Kabupaten Balangan dilaksanakan dengan metode diskusi kelompok terarah atau Focus Grup Discussion (FGD) dengan jumlah 13 responden kunci, meliputi pemerintah daerah, pedagang, unit pengolahan dan pemasaran dan petani.

Tabel 6. Responden Stakeholder

No	Stakeholders	Jumlah Responden (Jiwa)	Keterangan
1	Pemerintah Daerah	3	
2	Pedagang	3	
3	Unit Pengolahan dan Pemasaran	5	
4	Petani	2	
	Total	13	

Sumber: Tim Peneliti Tahun 2017

3.2. Lokasi dan Batasan Penelitian

Wilayah penelitian Kajian Fasilitasi Produksi dan Harga Karet di Kabupaten Balangan adalah di Kabupaten Balangan. Adapun ruang lingkup materi pada penelitian ini adalah dibatasi pada:

- a. Mengidentifikasi potensi karet di Kabupaten Balangan. Dari 23.953 Ha lahan yang menghasilkan akan dipilah lagi pada lahan yang didominasi oleh tanaman karet unggul dan karet rakyat.
- b. Memetakan hulu ke hilir dari produksi karet di Kabupaten Balangan. Dari supply bahan baku, teknologi yang dipergunakan, proses produksi/pengolahan, kapasitas produksi, sampai dengan jalur pemasaran, sebagai bahan analisis kelayakan teknis perusahaan daerah pengolahan karet.
- c. Melakukan pemetaan pemasaran karet rakyat untuk mengetahui rantai pemasaran.
- d. Mengidentifikasi semua biaya yang terjadi baik biaya sebelum menghasilkan yang disebut biaya pokok, maupun biaya operasional setelah menghasilkan.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung di lapangan, terutama dengan melakukan pengamatan langsung/interview dengan petani karet serta pedagang/tengkulak. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari SOPD terkait, dan dengan mempelajari literatur.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey dan dokumentasi. Metode survey dilakukan dengan wawancara dengan pelaku usaha baik dengan petani maupun pedagang/tengkulak, serta pihak dari dinas terkait yaitu Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Diskusi Kelompok Terarah atau *Focus Grup Discussion* (FGD).

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis penelitian dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan rantai pemasaran yang terjadi dalam pemasaran karet alam rakyat yang disajikan dalam bentuk tabulasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Wilayah Penelitian

4.1.1. Lokasi

Kabupaten Balangan sebagian besar merupakan daerah dataran dengan ketinggian antara 25-100 mdpl, terletak pada posisi 2^o01'37" Lintang Utara dan 02^o35'58" Lintang Selatan, serta 114^o50' dan 115^o50' Bujur Timur. Luas wilayah Balangan, adalah berupa daratan seluas 130.298 km². Wilayah administrasi Kabupaten Balangan terdiri dari 8 wilayah kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No. 23 Tahun 2006 luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Lampihong (96,96 km²), Batumandi (147,96 km²), Awayan (142,57 km²), Tebing Tinggi (257,25 km²), Paringin (100,04 km²), Paringin Selatan (86,80 km²), Juai (368,88 km²), dan Seta Halong (659,84 km²).

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kabupaten Balangan terdiri dari:

0 m - 7 m	= 1,87 %
7 m - 25 m	= 19,56 %
25 m -100 m	= 38,28 %
100 m – 500m	= 31,27 %
500 m keatas	= 9 %

Jarak antara ibukota kabupaten ke daerah kecamatan:

Paringin Selatan - Lampihong: 15 km.

Paringin Selatan - Batumandi: 12 km.

Paringin Selatan - Awayan: 13 km.

Paringin Selatan - Tebing Tinggi: 18 km.

Paringin Selatan - Paringin: 3 km.

Paringin Selatan - Juai: 21 km.

Paringin Selatan - Halong: 12 km.

Wilayah Kabupaten Balangan bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, bagian selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

4.1.2. Luas Wilayah

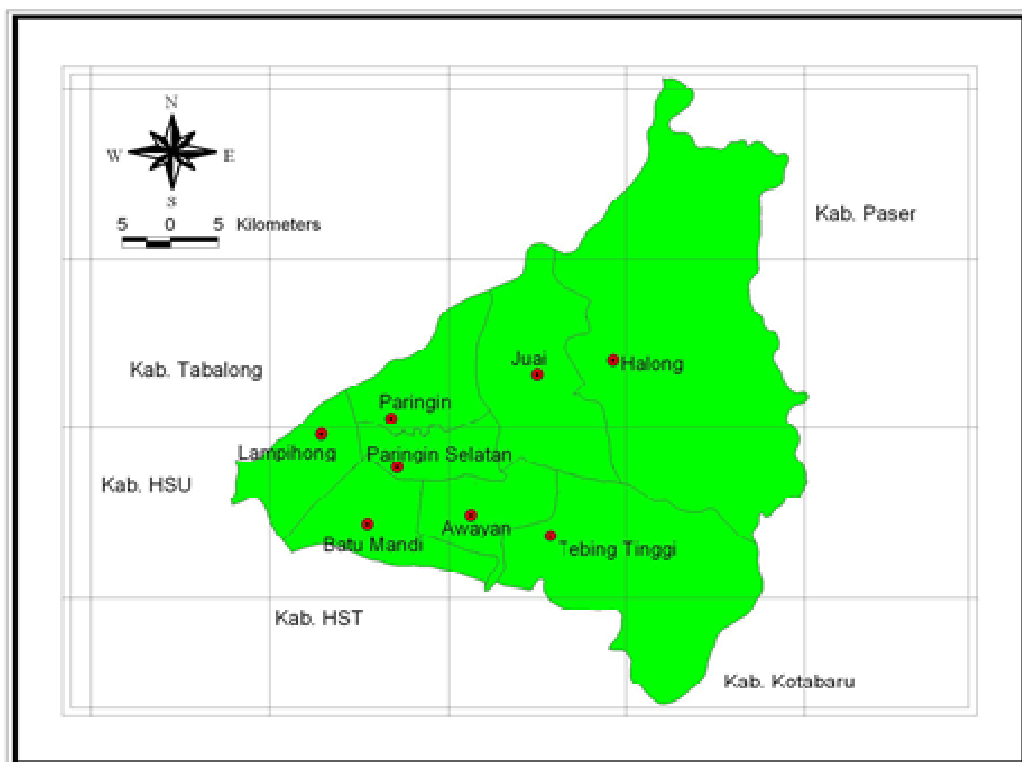
Kabupaten Balangan yang memiliki wilayah seluas 1.878,30 km² terbagi menjadi 8 kecamatan dengan 157 desa. Kecamatan Halong merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah 659,84 Km² atau 35,13% dari luas Kabupaten Balangan, sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Paringin Selatan yang luasnya hanya 86,80 Km² atau 4,62% dari luas wilayah Kabupaten Balangan. Luas wilayah menurut kecamatan serta jumlah desa per kecamatan lebih jelasnya disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Balangan Tahun 2016

No	K e c a m a t a n	Jumlah Desa	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Lampihong	27	96,96	5,16
2	Batu Mandi	18	147,96	7,88
3	Awayan	23	142,57	7,59
4	Tebing Tinggi	12	257,25	13,70
5	Paringin	16	100,04	5,53
6	Paringin Selatan	16	86,80	4,62
7	Juai	21	368,88	20,59
8	Halong	24	659,84	35,13
	Balangan	157	1.878,30	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Balangan (2017)

Peta wilayah geografis Kabupaten Balangan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Balangan Tahun 2017

Gambar 1. Peta Geografis Kabupaten Balangan

4.1.3. Iklim

Iklim dan curah hujan di Kabupaten Balangan termasuk yang beriklim tropis, musim hujan berkisar antara bulan Oktober sampai dengan bulan April dan musim kemarau atau panas berkisar pada bulan Mei sampai dengan September setiap tahunnya. Sedangkan Suhu di daerah Kabupaten Balangan berkisar antara 23,2°C sampai 31,7°C. Curah hujan bulanannya sekitar 175 mm dengan kisaran antara 45 – 400 mm. Bulan-bulan basah terjadi sekitar Desember – Januari, dan bulan-bulan kering sekitar Agustus - September. Menurut klasifikasi Schmidt & Ferguson iklim Kabupaten Balangan termasuk tipe B.

4.1.4. Tanah

Jenis tanah Podsolik Merah Kuning dengan bahan induk batuan endapan yang sifat anahnya mudah tererosi dan umumnya miskin unsur Hara mendominasi wilayah ini. Kemiringan lerengnya didominasi oleh lahan dengan kemiringan rendah (0-5%), sisanya memiliki kemiringan sedang (15-40%) dan lebih dari 40%. Kedalaman efektif tanah rata-rata lebih dari 90 cm, dan sebagian besar tanahnya bertekstur halus.

4.1.5. Penduduk Kabupaten Balangan

Jumlah penduduk Kabupaten Balangan hasil proyeksi penduduk tahun 2016 adalah 125.534 jiwa yang terdiri dari 63.219 laki-laki dan 62.315 perempuan. Dengan luas wilayah 1.878,30 km², Balangan memiliki rata-rata kepadatan penduduk 67 orang per kilometer persegi. Dua

kecamatan terpadat di Kabupaten Balangan antara lain Kecamatan Paringin dan Lampihong dengan kepadatan penduduk masing-masing 188 dan 178 orang per km². Adapun kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi, Halong, dan Juai dimana tingkat kepadatannya lebih rendah daripada angka kepadatan rata-rata Kabupaten Balangan. Jumlah penduduk Balangan tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 1,69% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan laju pertumbuhan sebesar itu pemerintah perlu menyiapkan perencanaan dalam hal peningkatan pemerataan kesejahteraan baik pangan, kesempatan kerja, pendidikan kesehatan maupun perumahan di masa mendatang.

Komposisi penduduk Kabupaten Balangan yang dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan penduduk laki-laki maupun perempuan terbanyak berada pada kelompok umur muda, yakni kelompok umur 0-14 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Balangan memiliki populasi penduduk muda yang relatif besar seperti seperti digambarkan oleh piramida penduduk dengan karakteristik *expansif*. Bentuk piramida seperti ini umumnya dijumpai di negara-negara berkembang, disebabkan oleh tingkat kelahiran yang tinggi. Tabel 8 berikut menunjukkan jumlah penduduk menurut kecamatan, jenis kelamin dan rata-rata penduduk per desa serta kepadatan penduduk pada tahun 2016.

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, Rata-rata, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Balangan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Desa	Rata-rata Penduduk per Desa	Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²)
		Laki-laki	Perempuan				
1	Lampihong	8 622	8 675	17 297	27	641	176
2	Batu Mandi	8 993	8 714	17 707	18	984	118
3	Awayan	6 672	6 822	13 494	23	587	93
4	Tebing Tinggi	3 335	3 339	6 674	12	556	25
5	Paringin	9 497	9 309	18 806	16	1.175	185
6	Paringin Selatan	6 463	6 356	12 819	16	801	145
7	Juai	8 981	8 786	17 767	21	846	45
8	Halong	10 656	10 314	20 970	24	874	31
	Balangan	63.219	62.315	125.534	157	800	66

Sumber: BPS Kabupaten Balangan Tahun 2017

Tabel di atas tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Paringin dengan luas 5,53% dari luas Kabupaten Balangan mendudukan urutan kedua setelah Kecamatan Halong dari segi jumlah penduduk yaitu sebanyak 18.806 jiwa atau sebesar 14,98% dari penduduk Kabupaten Balangan. Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jenis kelamin perempuan dengan rasio 101. Kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 6.674 jiwa dengan rata-rata penduduk sebanyak 556 jiwa per desa atau di bawah rata-rata penduduk per desa di Kabupaten Balangan.

4.1.6. Kondisi Perekonomian Kabupaten Balangan

Pengeluaran penduduk dicatat dalam segala aspek, dari konsumsi makanan, non-makanan, dan aneka transaksi keuangan. Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Balangan di tahun 2016 paling besar di kelompok lebih dari Rp 1.000.000,- perbulan dengan persentase sebanyak 34,66% dari total penduduk Balangan. Walaupun masih tercatat

ada 0,63% penduduk yang pengeluaran per kapitanya di bawah angka Rp300.000,- per bulannya.

4.1.6.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perkembangan perekonomian suatu daerah adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB disini menggunakan pendekatan produksi yaitu nilai tambah bruto dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Struktur ekonomi suatu daerah diukur dari peran masing-masing sektor/lapangan usaha terhadap total PDRB. Semakin besar nilai tambah yang tercipta di suatu sektor ekonomi akan membuat peran sektor tersebut semakin penting. Struktur ekonomi suatu daerah menjadi indikator penentu apakah daerah tersebut didominasi oleh sektor primer, sekunder ataupun tersier. Sektor primer adalah sektor yang masih banyak mengandalkan peran sumber daya alam dalam proses produksi, yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian.

Struktur ekonomi Kabupaten Balangan masih dikuasai oleh kategori lapangan usaha primer yakni kategori pertanian dan kategori pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2016, kategori ini mampu memberikan kontribusi sampai dengan 74,47%, dimana andil terbesar didominasi oleh kategori pertambangan dan penggalian sebesar 62,11%, kemudian diikuti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar

12,36%. Kontribusi terkecil diberikan oleh kategori pengadaan listrik dan gas dimana hanya mampu menyumbangkan 0,03% terhadap total PDRB (dengan minyak bumi dan pertambangan batu bara) atas dasar harga berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Balangan masih mengandalkan sumber daya alam dan pengelolaannya masih mengandalkan tenaga manusia tanpa diimbangi dengan penggunaan teknologi. Hal ini terlihat dari masih rendahnya penggunaan listrik dan gas yang tentunya terkait erat dengan penggunaan teknologi oleh masyarakat, termasuk di dalamnya penggunaan teknologi oleh pabrik-pabrik pengolahan.

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estat; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan (17) Jasa

lainnya. Distribusi PDRB Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 9. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014–2016 (juta Rp)

No	Lapangan Usaha	2014		2015*		2016**	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	1.008.057,36	10,78	1.097.515,56	11,81	1.166.053,40	12,36
B	Pertambangan dan Penggalian	6.432.466,50	68,78	6.014.298,42	64,72	5.859.618,37	62,11
C	Industri Pengolahan	142.356,75	1,52	161.040,52	1,73	180.255,11	1,91
D	Pengadaan Listrik, Gas	1.574,99	0,02	2.327,26	0,03	2.926,25	0,03
E	Pengadaan Air	18.099,75	0,19	19.887,77	0,21	21.567,35	0,23
F	Konstruksi	327.495,02	3,50	376.382,88	4,05	411.386,48	4,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	385.723,50	4,12	430.612,23	4,63	489.025,64	5,18
H	Transportasi dan Pergudangan	142.074,68	1,52	159.226,70	1,71	175.319,26	1,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	24.360,21	0,26	27.253,99	0,29	29.695,13	0,31
J	Informasi dan Komunikasi	104.492,02	1,12	112.070,58	1,21	120.700,01	1,28
K	Jasa Keuangan	22.115,39	0,24	24.336,33	0,26	27.417,05	0,29
L	Real Estate	73.751,97	0,79	80.484,47	0,87	86.923,23	0,92
M,N	Jasa Perusahaan	4.910,33	0,05	5.577,36	0,06	6.162,99	0,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	341.184,63	3,65	404.951,08	4,36	424.978,03	4,50
P	Jasa Pendidikan	224.435,49	2,40	262.424,08	2,82	303.296,63	3,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61.416,78	0,66	71.557,01	0,77	80.052,76	0,85
R,S, T,U	Jasa lainnya	37.123,19	0,40	43.266,80	0,47	48.292,46	0,51
	PDRB dengan Pertambangan Migas dan Batubara	9.351.638,56	100	9.293.213,04	100	9.433.670,14	100
	PDRB Tanpa Pertambangan Migas dan Batubara	2.927.069,62		3.283.493,95		3.579.188,40	

*Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2017

Tabel tersebut menunjukkan bahwa PDRB atas dasar harga berlaku dengan sektor pertambangan migas dan batubara di Kabupaten Balangan tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun terjadi peningkatan lagi pada tahun 2016 sebesar 1,51% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dilihat dari lapangan

usaha, Kabupaten Balangan masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu: (1) pertambangan dan penggalian, (2) pertanian, kehutanan, dan perikanan dan (3) perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor.

Tahun 2016 menunjukkan bahwa kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian terhadap PDRB sebesar 62,11% (turun dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2014), pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 12,36% (naik dibandingkan tahun 2015 dan 2014), dan perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,18% (naik dibandingkan tahun 2015 dan 2014). PDRB per kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita di Kabupaten Balangan selama kurun waktu 2015-2016 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 10. PDRB Perkapita Kabupaten Balangan Tahun 2015 - 2016

PDRB Perkapita	2015*	2016**
Dengan Pertambangan Minyak Bumi dan Batubara:		
ADHB	75.279.775,76	75.148.327,46
ADHK	67.911.233,73	68.475.597,35
Tanpa Pertambangan Minyak Bumi dan Batubara:		
ADHB	26.579.979,32	28.511.705,20
ADHK	20.552.336,07	21.363.716,42

*) Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, Tahun 2017

Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Balangan dapat diketahui bawah pada tahun 2016 PDRB perkapita Kabupaten Balangan

atas dasar harga konstan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, baik dengan pertambangan, minyak bumi dan batubara maupun tanpa pertambangan, minyak bumi dan batubara. Namun atas dasar harga berlaku, PDRB perkapita dengan pertambangan, minyak bumi dan batubara pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, untuk melihat pemerataan pendapatan yang menunjukkan tingkat ketimpangan pembagian pendapatan maka dapat dilihat dari angka gini ratio di Kalimantan Selatan pada tahun 2015, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 11. Perbandingan Gini Rasio Menurut Kabupaten di Kalimantan Selatan Tahun 2015

No	Kabupaten	Gini Ratio Tahunan
1	Tanah Laut	0,27
2	Kotabaru	0,35
3	Banjar	0,32
4	Barito Kuala	0,37
5	Tapin	0,35
6	Hulu Sungai Selatan	0,31
7	Hulu Sungai Tengah	0,33
8	Hulu Sungai Utara	0,36
9	Tabalong	0,29
10	Tanah Bumbu	0,33
11	Balangan	0,40
12	Kota Banjarmasin	0,39
13	Kota Banjarbaru	0,35
	Kaimantan Selatan	0,35

Sumber: BPS Kalsel 2016

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2015, Kabupaten Balangan mendapatkan tingkat gini ratio sebesar 0,4. Angka ini paling tinggi dibandingkan dengan angka gini ratio di setiap kabupaten di Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Balangan memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi di Kalimantan Selatan.

4.1.6.2. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Balangan mengalami pertumbuhan yang cenderung melambat selama tahun 2012-2016. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan tahun 2012 sampai 2016 ditunjukkan dalam Tabel berikut.

Tabel 12. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 – 2016 (persen)

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	2,68	3,44	4,06	4,70	4,4
B	Pertambangan dan Penggalian	7,63	9,34	6,45	1,10	1,2
C	Industri Pengolahan	5,22	5,20	4,74	4,70	6,1
D	Pengadaan Listrik, Gas	8,50	2,61	12,99	20,20	7,4
E	Pengadaan Air	3,82	3,73	6,48	4,57	6,9
F	Konstruksi	6,17	6,01	6,05	5,72	5,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,81	6,13	4,33	5,94	8,8
H	Transportasi dan Pergudangan	6,45	6,79	6,54	5,90	6,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,28	8,43	5,12	7,20	5,8
J	Informasi dan Komunikasi	3,15	3,46	4,95	5,30	6,5
K	Jasa Keuangan	3,51	6,25	5,43	4,33	10,0
L	Real Estate	7,81	9,10	5,34	5,20	6,2
M,N	Jasa Perusahaan	5,43	7,89	7,54	7,36	8,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,90	5,69	5,54	8,60	2,1
P	Jasa Pendidikan	5,46	6,07	6,21	8,10	8,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,02	7,24	5,74	6,17	8,2
R,S, T,U	Jasa lainnya	5,35	3,64	5,78	6,20	7,1
	PDRB dengan Pertambangan Migas dan Batu Bara	6,69	8,04	6,01	2,50	2,5
	PDRB tanpa pertambangan Migas dan Batubara	4,60	5,05	4,97	5,80	5,7

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, Tahun 2017

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan cenderung melambat di tahun 2012 yaitu sebesar 6,69% dan tahun 2014 sebesar 6,01% hingga tahun 2015 sebesar 3,12%. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan nilai tambah bruto pada kategori

lapangan usaha yang cukup dominan di Balangan, yakni kategori pertambangan dan penggalian. Subkategori pertambangan batu bara sangat berperan dalam kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Kontribusi subkategori pertambangan yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan.

4.2. Profil Pelaku Usaha Tani Karet (Responden Penelitian Fasilitasi Harga Karet

Profil pelaku usaha dalam kegiatan pertanian karet di Kabupaten Balangan akan diuraikan meliputi jenis kelamin, kelompok usia, pendidikan, status perkawinan, jumlah beban tanggungan keluarga, dan jenis pekerjaan selain petani karet.

Pelaku usaha petani karet di Kabupaten Balangan mayoritas dilakukan oleh perempuan (78,7%) sedangkan laki-laki (21,3%). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Balangan memiliki andil yang sangat dominan dibandingkan laki-laki dalam hal sebagai pelaku usaha karet, selengkapnya disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 13. Jenis Kelamin Responden Petani Karet Kabupaten Balangan

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki	32	21.3
2	Perempuan	118	78.7
	Total	150	100.0

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 (diolah)

Kelompok umur pelaku usaha petani karet di Kabupaten Balangan menunjukkan angka dominan antara 31-40 tahun (36,7%) dan terendah

pada usia 20-30 tahun (15,3%). Pelaku usaha tani karet di Kabupaten Balangan secara keseluruhan telah berada pada usia produktif yakni 15-64 tahun, selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 14. Kelompok Usia Responden Petani Karet Kabupaten Balangan

No	Kelompok Usia	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1	Usia 20 s/d 30	23	15.3
2	Usia 31 s/d 40	55	36.7
3	Usia 41 s/d 50	43	28.7
4	> 50 Tahun	29	19.3
	Total	150	100.0

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 (diolah)

Pendidikan formal pelaku usaha petani karet di Kabupaten Balangan menunjukkan angka dominan pada jenjang pendidikan yang rendah yakni SD/MI (48,0%) dan terendah S1 (1,3%), selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 15. Pendidikan Formal Responden Petani Karet Kabupaten Balangan

No	Pendidikan Formal	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1	SD/MI	72	48,0
2	SMP/MTs	45	30,0
3	SMA/SMK/MA	31	20,7
4	S1	2	1,3
	Total	150	100.0

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 (diolah)

Status perkawinan pelaku usaha petani karet di Kabupaten Balangan menunjukkan mayoritas berstatus kawin (92,7%) dan sisanya terdistribusi pada status tidak kawin (6%) dan status duda/janda (1,3%), selengkapnya disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 16. Status Perkawinan Responden Petani Karet Kabupaten Balangan

No	Status Perkawinan	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1	Tidak Kawin	9	6,0
2	Kawin	139	92,7
3	Duda/Janda	2	1,3
	Total	150	100.0

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 (diolah)

Jumlah tanggungan keluarga adalah banyaknya anggota keluarga yang terdiri dari istri, dan anak, serta orang lain yang turut serta dalam keluarga berada atau hidup dalam satu rumah dan makan bersama yang menjadi tanggungan kepala keluarga. Jumlah tanggungan keluarga pelaku usaha petani karet di Kabupaten Balangan mayoritas 2 dan 3-5 anggota keluarga, selengkapnya tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 17. Jumlah Tanggungan Keluarga (Jiwa) Responden Petani Karet Kabupaten Balangan

No	Tanggungan Keluarga (Jiwa)	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1	0-2	73	48,7
2	3-5	68	45,3
3	6-8	9	6,0
	Total	150	100.0

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 (diolah)

Jenis pekerjaan selain petani karet di Kabupaten Balangan yakni petani padi (10,0%) dan sisanya sebesar 5,4% terdistribusi pada jenis pekerjaan PNS (2,7%), penjahit (1,3%), pedagang dan lainnya masing-masing (0,7%). Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah pelaku usaha petani karet sebesar 83,3%, selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 18. Jenis Pekerjaan selain Petani Karet menurut Responden Petani Karet Kabupaten Balangan

No	Jenis Pekerjaan Lain	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1	Tidak Ada	125	83,3
2	Petani Padi	15	10,0
3	Pedagang	1	0,7
4	PNS	4	2,7
5	Penjahit	2	1,3
6	Lainnya	1	0,7
	Total	150	100,0

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 (diolah)

4.2.1. Status dan Luas Kepemilikan Lahan

Status kepemilikan lahan pelaku usaha petani karet di Kabupaten Balangan menunjukkan mayoritas adalah milik sendiri (95,3%) dan sewa (2,7%) dan status lainnya (2,0%), selengkapnya disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Status Kepemilikan Lahan Responden Petani Karet Kabupaten Balangan

No	Status Kepemilikan Lahan	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1	Milik Sendiri	143	95,3
2	Sewa	4	2,7
3	Lainnya	3	2,0
	Total	150	100,0

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 (diolah)

Selanjutnya luas lahan tanaman karet dari pelaku usaha petani karet di Kabupaten Balangan menunjukkan mayoritas antara 1-2,5 ha (72,0%) dan terendah 40 ha (0,7%) selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 20. Luas Lahan Tanaman Karet (Ha) Responden Petani Karet Kabupaten Balangan

No	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1	0,2-0,75	29	19,3
2	1,0-2,5	108	72,0
3	3,0-5,0	12	8,0
4	40	1	0,7
	Total	150	100,0

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 (diolah)

4.2.2. Jumlah Kepemilikan dan umur Pohon Karet

Jumlah kepemilikan pohon dari pelaku usaha petani karet di Kabupaten Balangan menunjukkan mayoritas 90-450 pohon (42,0%) dan terendah 16.000 pohon (0,7%), selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 21. Jumlah Pohon Tanaman Karet menurut Responden Petani Karet Kabupaten Balangan

No	Jumlah Pohon	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1	90-450	63	42,0
2	550-900	54	36,0
3	1.000-2.800	32	21,3
4	16.000	1	0,7
	Total	150	100,0

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 (diolah)

Selanjutnya umur tanaman pohon karet yang dikelola oleh pelaku usaha petani karet di Kabupaten Balangan menunjukkan mayoritas berumur 11-20 (46,0%) dan 6-10 tahun (43,3%) dan sisanya terdistribusi pada umur 0-5 tahun (5%) dan umur 21-40 tahun (5,3%), selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 22. Klasifikasi Umur Tanaman Pohon Karet (Tahun) menurut Responden Petani Karet Kabupaten Balangan

No	Umur Pohon (Tahun)	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1	0-5	8	5,0
2	6-10	65	43,3
3	11-20	69	46,0
4	21-40	8	5,3
	Total	150	100,0

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 (diolah)

4.2.3. Pengalaman dan Produksi Karet

Pengalaman pelaku usaha petani karet di Kabupaten Balangan menunjukkan mayoritas 11-20 tahun (48,0%) dan sisanya terdistribusi pada pengalaman antara 1-5 tahun (24,7%), dan beberapa tahun lainnya sebagai petani karet, selengkapnya disajikan pada Tabel beriku.

Tabel 23. Klasifikasi Lamanya Pengalaman Responden Petani Karet Kabupaten Balangan

No	Pengalaman (Tahun)	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1	1-5	37	24,7
2	6-10	20	13,3
3	11-20	72	48,0
4	21-40	21	14,0
	Total	150	100,0

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 (diolah)

Jumlah produksi lateks per hektar yang dihasilkan oleh pelaku usaha petani karet di Kabupaten Balangan menunjukkan mayoritas antara 5-20 Kg/Ha (40,0%) dan terendah 100-200 kg/ha (1,3%), selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 24. Jumlah Produksi Lateks per Hektar (Kg/Ha) menurut Responden Petani Karet Kabupaten Balangan

No	Produksi Lateks (Kg/Ha)	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1	5-20	60	40,0
2	21-30	51	34,0
3	31-65	37	24,7
4	100-200	2	1,3
	Total	150	100,0

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 (diolah)

Jumlah produksi lateks per tahun yang dihasilkan oleh pelaku usaha petani karet di Kabupaten Balangan menunjukkan mayoritas adalah 1 ton

per tahun (86,0%) dan terendah 4 ton/tahun (0,7%), selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 25 Produksi Lateks per tahun (Ton) menurut Responden Petani Karet Kabupaten Balangan

No	Produksi Lateks per Tahun (Ton)	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1	1	129	86,0
2	2	10	6,7
3	3	4	2,7
4	4	1	0,7
5	5	6	4,0
	Total	150	100,0

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 (diolah)

4.2.4. Karyawan dan Pendapatan Petani Karet

Jumlah karyawan yang dipekerjakan oleh pelaku usaha petani karet di Kabupaten Balangan menunjukkan yakni rata-rata 1 orang (60,7%), 2 orang (2,7%), 3 orang (0,7%) dan > orang (4%). Secara mayoritas pelaku usaha petani karet dikelola sendiri (86,0%), selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 26. Jumlah Karyawan dalam Pengelolaan Kebun Karet menurut Responden Petani Karet Kabupaten Balangan

No	Jumlah Karyawan (Jiwa)	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1	Dikelola Sendiri	129	86,0
2	1 Orang	10	6,7
3	2 Orang	4	2,7
4	3 Orang	1	0,7
5	> 3 Orang	6	4,0
	Total	150	100,0

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 (diolah)

Jumlah pendapatan per bulan yang dihasilkan oleh pelaku usaha petani karet di Kabupaten Balangan menunjukkan mayoritas antara Rp.

1.000.000 sd. Rp. 2.000.000 (53,3%), dan terendah Rp. 7.500.000 sd. Rp. 12.500.000 (1,3%), selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 27. Klasifikasi Pendapatan Hasil Karet per bulan menurut Responden Petani Karet Kabupaten Balangan

No	Pendapatan (Rp/Bulan)	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1	Rp. 176.000 - Rp. 900.000	24	16,0
2	Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000	80	53,3
3	Rp. 2.100.000 - Rp. 4.000.000	39	26,0
4	Rp. 4.100.000 - Rp. 7.500.000	7	4,7
5	Rp. 7.500.000 - Rp.12.500.000	2	1,3
	Total	150	100,0

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 (diolah)

Jumlah pendapatan diluar kegiatan perkebunan karet oleh pelaku usaha petani karet di Kabupaten Balangan menunjukkan mayoritas antara <Rp.50.000 (94%) dan terendah Rp. 3.000.000-Rp.30.000.000 (2,7%), hal ini menggambarkan bahwa masyarakat pelaku usaha petani karet di Kabupaten Balangan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap perkebunan karet, selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 28. Klasifikasi Pendapatan diluar Kegiatan Perkebunan Karet menurut Responden Petani Karet Kabupaten Balangan

No	Pendapatan (Rp/Bulan)	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1	≤Rp. 50.000	141	94,0
2	Rp. 100.000 - Rp. 400.000	5	3,3
3	Rp. 3.000.000- ≤Rp. 30.000.000	4	2,7
	Total	150	100,0

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 (diolah)

4.2.5. Jarak Tempat Tinggal, Frekuensi Penyadapan dan Jumlah

Penghasilan Getah Pohon Karet

Jarak tempat tinggal responden dengan kebun oleh pelaku usaha petani karet di Kabupaten Balangan menunjukkan mayoritas antara 0-<5

km (87,3%) dan terendah 5-<15 km (12,7%), selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 29. Jarak Tempat Tinggal dengan Kebun (Km) menurut Responden Petani Karet Kabupaten Balangan

No	Jarak (Km)	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1	0-<5 Km	131	87,3
2	5-<15 Km	19	12,7
	Total	150	100.0

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 (diolah)

Frekuensi penyadapan karet per minggu oleh pelaku usaha petani karet di Kabupaten Balangan menunjukkan mayoritas antara 6-7 kali/minggu (54,0%) dan terendah 1-2 kali/minggu (10,0%), selengkapnya disajikan pada Tabel 30 berikut.

Tabel 30. Frekuensi Penyadapan Karet per Minggu menurut Responden Petani Karet Kabupaten Balangan

No	Frekuensi Penyadapan Karet per Minggu (Kali)	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1	1-2	15	10,0
2	3-5	54	36,0
3	6-7	88	54,0
	Total	150	100.0

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 (diolah)

Frekuensi panen getah karet per minggu yang dihasilkan oleh pelaku usaha petani karet di Kabupaten Balangan menunjukkan mayoritas antara 1-5 Kg (96,3%) dan terendah 6-7 Kg (2,7%), selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 31. Frekuensi Panen Getah Karet per Minggu menurut Responden Petani Karet Kabupaten Balangan

No	Frekuensi Panen per Minggu (Kali)	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1	1-5	146	96,3
2	6-7	4	2,7
	Total	150	100.0

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 (diolah)

Jumlah produksi getah per kali panen (Kg) yang dihasilkan oleh pelaku usaha petani karet di Kabupaten Balangan menunjukkan mayoritas antara 4-20 Kg (41,3%) dan terendah 7.500 kg (0,7%), selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 32. Jumlah Getah per kali Panen (Kg) menurut Responden Petani Karet Kabupaten Balangan

No	Jumlah Getah per Kali Panen (Kg)	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1	4-20	62	41,3
2	21-40	43	28,7
3	41-80	31	20,7
4	81-192	14	9,3
5	7500	1	0,7
	Total	150	100.0

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 (diolah)

4.3. Perkebunan dan Rantai Distribusi Pemasaran Karet di Kabupaten Balangan

Perkebunan karet di Kabupaten Balangan dari sisi luas tanam dan produksi karet mengalami mengalami fluktuasi pertumbuhan dari tahun 2012 sd. Tahun 2016. Luasan tanaman karet dari tahun 2012-2013 mengalami pertumbuhan secara positif 2,17% dan mengalami pertumbuhan negatif (penurunan) sebesar -0,94% pada tahun 2014 sd. 2015, namun mengalami pertumbuhan secara positif sebesar 0,95% pada tahun 2016, selanjutnya produksi karet mengalami pertumbuhan negatif

sebesar -5,80% pada tahun 2012-2013 dan -1,96% pada tahun 2014-2015, dan mengalami pertumbuhan positif (1,29%) pada tahun 2015-2016.

Tabel 33. Luas Tanam dan Produksi Karet (Ha)

No	Luas dan Produksi Karet (Ha)	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Luas Tanam	37.272	38.082	37.900	37.544	37.900
2	Produksi	26.839	25.282	25.457	24.959	25.282
		Pertumbuhan (%)				
3	Luas Tanam		2,17	-0,48	-0,94	0,95
	Produksi		-5,80	0,69	-1,96	1,29

Sumber: BPS Kabupaten Balangan Tahun 2012-2017

Berdasarkan Tabel tersebut menjelaskan bahwa kondisi eksisting dari tahun 2016 hingga sekarang mengalami pertumbuhan secara positif. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas perkebunan karet merupakan salah satu kegiatan utama masyarakat di Kabupaten Balangan. Rincian luas tanam dan produksi menurut wilayah di Kabupaten Balangan tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 34. Luas Tanaman dan Produksi Karet menurut Wilayah Kecamatan di Kabupaten Balangan

No	Kecamatan	Tahun									
		2012		2013		2014		2015		2016	
		Luas Tanaman (Ha)	Produksi (Ha)	Luas Tanaman (Ha)	Produksi (Ha)	Luas Tanaman (Ha)	Produksi (Ha)	Luas Tanaman (Ha)	Produksi (Ha)	Luas Tanaman (Ha)	Produksi (Ha)
1	Lampihong	2.232	1.130	2.304	1.132	2.194	1.132	2.142	1.132	2194	1.132
2	Batu Mandi	6.444	4.409	6.569	4.485	6.839	4.495	6.798	4.465	6839	4.485
3	Awayan	7.377	5.904	7.497	5.353	7.366	5.357	7.321	5.353	7366	5.353
4	Tebing Tinggi	4.531	3.156	4.574	2.860	4.412	2.860	4.373	2.860	4412	2.860
5	Paringin	5.753	5.276	5.810	4.746	5.711	4.786	5.675	4.546	5711	4.746
6	Paringin Selatan	3.091	2.112	3.142	1.918	3.019	1.978	2.968	1.915	3019	1.918
7	Juai	3.167	1.820	3.289	1.921	3.280	1.952	3.232	1.921	3280	1.921
8	Halong	4.677	3.032	4.897	2.867	5.079	2.897	5.035	2.767	5079	2.867
	Balangan	37,272	26.839	38.082	25.282	37.900	25.457	37.544	24.959	37.900	25.282

Sumber: BPS Kabupaten Balangan Tahun 2012-2017

4.3.1. Rantai Distribusi Pemasaran Karet di Kabupaten Balangan

Kelembagaan tradisional dalam sistem pemasaran bokar merupakan kelembagaan yang telah lama berkembang di sentra-sentra produksi karet rakyat. Kelembagaan ini berkembang seiring dengan berkembangnya perkebunan karet rakyat. Pedagang perantara memegang peranan yang sangat dominan dalam kelembagaan ini. Pusat-pusat produksi karet rakyat yang lokasinya sampai ke pelosok perdesaan terpencil dihubungkan oleh pedagang perantara ini dengan pusat-pusat pengolahan (pabrik pengolahan) yang berada di sekitar Kabupaten Balangan. Antara pusat pengolahan dan sentra produksi bokar yang terpencil terbentuk suatu hierarki pedagang dari pedagang kecil yang dapat menjangkau sampai ke perkebunan, selanjutnya pedagang kecil menjual ke pedagang besar yang ada di kecamatan, dan kabupaten, dan akhirnya sampai di pabrik pengolahan.

Dalam sistem pemasaran bokar, awalnya hanya dikenal kelembagaan ini sehingga 100% bokar yang diproduksi petani dapat dikatakan ditransaksikan melalui kelembagaan ini. Kelembagaan tata niaga lain baru muncul setelah adanya proyek-proyek pengembangan karet rakyat yang dikenal dengan Gabungan Kelompok Tani Karet. Hingga saat ini kelembagaan tradisional masih memiliki peran yang dominan dalam tata niaga bokar di Kabupaten Balangan. Kelembagaan tradisional dalam tata niaga bokar telah banyak mengalami pergeseran, baik dalam hal hubungan antara pedagang dan petani maupun praktik-praktik

transaksinya. Pada lokasi yang relatif terpencil dengan sarana komunikasi dan transportasi yang masih terbatas, biasanya hanya ada satu atau dua pedagang bokar yang melakukan transaksi. Pedagang ini pada umumnya juga memiliki usaha lain, seperti penyediaan bahan pokok sehingga secara umum memiliki kemampuan ekonomi yang lebih dibandingkan dengan masyarakat desa pada umumnya.

Dengan demikian, hubungan antara pedagang dan petani tidak terbatas pada transaksi bokar, tetapi juga menyangkut kebutuhan pokok dan pinjaman uang pada saat petani membutuhkan. Pada hakekatnya transaksi yang terjadi secara simultan ini adalah upaya memperkecil biaya transaksi dan sekaligus memperkecil risiko bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Sifat produksi karet yang sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim menyebabkan pada saat tertentu petani sama sekali tidak bisa menyadap sehingga tidak memperoleh pendapatan. Dalam keadaan demikian maka petani akan menggantungkan kebutuhan hidupnya kepada pedagang bokar, baik dalam bentuk kebutuhan pokok maupun pinjaman uang. Sebagai imbalan atas bantuan tersebut, petani akan menjual seluruh bokar yang dihasilkan kepada pedagang sehingga terbentuk suatu ikatan secara informal yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam bentuk hubungan prinsipal-agen.

Selalu ada anggapan bahwa harga yang ditetapkan pedagang sangat rendah sehingga petani dirugikan. Namun, pedagang sebagai

agen juga menanggung risiko, misalnya berupa kemungkinan tidak kembalinya pinjaman yang diberikan kepada petani walaupun persentasenya kecil. Di pihak lain, petani sebagai prinsipal tampaknya tidak semata-mata memandang pada harga bokar yang akan diterima, tetapi pada kemudahan prosedur mendapatkan bantuan di saat memerlukan serta faktor keamanan keberlangsungan kehidupannya sehingga pada kondisi demikian kedua belah pihak merasa memperoleh manfaat dari bentuk hubungan tersebut.

4.3.2. Identifikasi Rantai Distribusi Pemasaran

Distribusi pemasaran bokar di Kabupaten Balangan mulai dari tingkat petani sampai ke pabrik pengolahan dilakukan melalui jalur-jalur pemasaran sebagai berikut:

Tabel 35. Jalur distribusi Pemasaran Bokar menurut responden Penelitian

Uraian Distribusi	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Petani - Pengumpul Kecamatan - Pabrik pengolahan Karet	9	6.0	6.0	6.0
Petani - Pabrik pengolahan Karet	6	4.0	4.0	10.0
Petani - Pengumpul Desa - Pengumpul Kecamatan - UPPB - Pabrik pengolahan Karet	3	2.0	2.0	12.0
Petani - Pengumpul Desa - Pengumpul Kecamatan - Pelelangan - Pabrik pengolahan Karet	7	4.7	4.7	16.7
Petani - Pengumpul Kecamatan/Pengumpul dengan Mobil - Pabrik pengolahan Karet	125	83.3	83.3	100.0
Total	150	100.0	100.0	

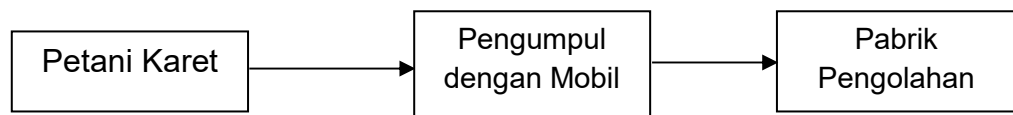
Sumber; Data Primer, 2017

Berdasarkan pada Tabel di atas, jalur distribusi pemasaran bokar oleh petani sebagian besar (83.30 %) adalah **Petani ----> Pengumpul**

Kecamatan/Pengumpul dengan Mobil ----> Pabrik pengolahan Karet,

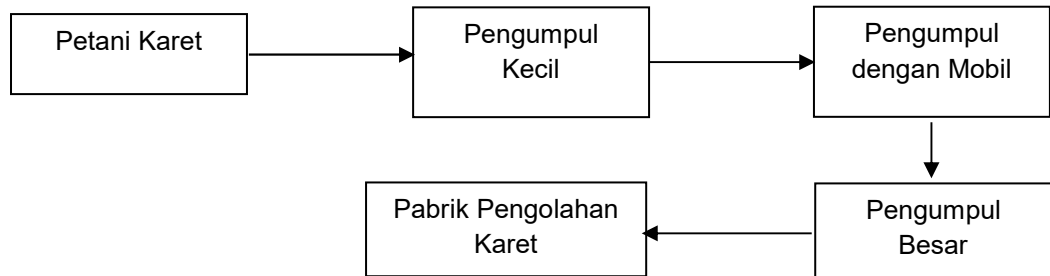
hal ini sesuai juga dengan hasil FGD pada identifikasi I jalur distribusi Pemasaran karet di Kabupaten Balangan. Identifikasi pemasaran karet secara mendalam diperoleh dari informasi FGD yang hasilnya mengidentifikasi beberapa jalur pemasaran yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi I:



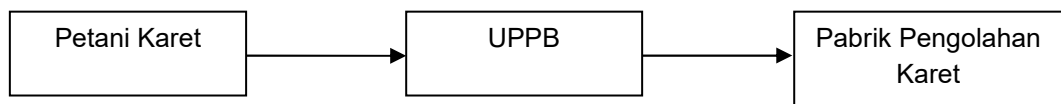
Identifikasi I tersebut hanya melibatkan pengumpul dengan menggunakan mobil sebagai perantara antara petani dan pabrik pengolahan. Jalur pada identifikasi I ini masih relatif pendek karena hanya satu tahap untuk sampai pada pabrik pengolahan. Namun seiring dengan perkembangan jumlah lahan karet dan tentunya produksi, maka semakin bertambah pula masyarakat yang berkeinginan untuk terjun ke dalam dunia pemasaran bokar, sehingga rantai distribusi pemasaran bokar semakin bertambah panjang dan pada akhirnya membuat pemasaran bokar dari petani ke pabrikan menjadi tidak efisien sebagaimana pada identifikasi II berikut.

2. Identifikasi II:



Sementara itu, pada identifikasi II, terdapat tiga pihak yang menjadi perantara antara petani karet dengan pabrik pengolahan karet. Pengumpul kecil menggunakan sepeda motor untuk menjangkau kebun karet yang tidak bisa dilalui dengan mobil, selanjutnya dijual kepada pengumpul yang menggunakan mobil kemudian ditampung oleh pengumpul besar yang ada di kabupaten. Identifikasi II ini menyebabkan rantai pemasaran agak panjang dan tentunya dengan panjangnya rantai pemasaran menyebabkan terjadinya tambahan-tambahan biaya yang tidak bisa dihindari.

3. Identifikasi III:



Identifikasi III jalurnya sama dengan identifikasi I, tetapi pada identifikasi ini petani karet membentuk gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang selanjutnya membentuk Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) yang akan menjadi wadah untuk menjual karet ke pabrik pengolahan. Menurut data dari Dinas Pertanian

Kabupaten Balangan tahun 2017 bahwa jumlah UPPB dapat dilihat pada pada tabel berikut:

Tabel 36. Jumlah UPPB di Kabupaten Balangan

No	Nama UPPB	Alamat	Jumlah Anggota Kelompok Tani
1	Sanggam Harapan	Desa Muara Ninian Kecamatan Juai	170
2	Tawakkal	Desa Karuh Kecamatan Batu Mandi	115
3	Maju Jaya I	Desa Minduin Ke. Batu Piring RT.12 Kec. Paringin Selatan	91
4	Sinar Harapan	Desa Lalayau Kecamatan Juai	170
5	Merak I	Desa Sungai Pumpung Kec. Awayan	148
6	Limpasu Indah	Desa Binjai Punggal Kec. Halong	152
7	Karya Sejahtera	Desa Muara Pitap Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan	91
8	Suka Maju	Desa Mundar Kecamatan Lampihong	172
9	Mitra Abadi	Desa Galumbang Kec. Paringin Selatan	91
10	Sabar Menanti	Desa Tebing Tinggi Kec. Tebin Tinggi	66
11	Berkat Sabar	Desa Hamparaya Kec. Batumandi	

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Balangan: 2017

Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Balangan telah membentuk UPPB, bahkan di Kecamatan Paringin Selatan ada 3 UPPB dan di Kecamatan Juai ada dua UPPB. Hal ini menunjukkan bahwa petani karet di Kabupaten Balangan umumnya tergabung dalam UPPB dalam hal pemasaran bokar.

Permasalahan mendasar dari UPPB adalah kurangnya permodalan, sehingga menjadi kendala bagi UPPB untuk membayar secara tunai atas penjualan bokar kepada anggota kelompok. Kondisi

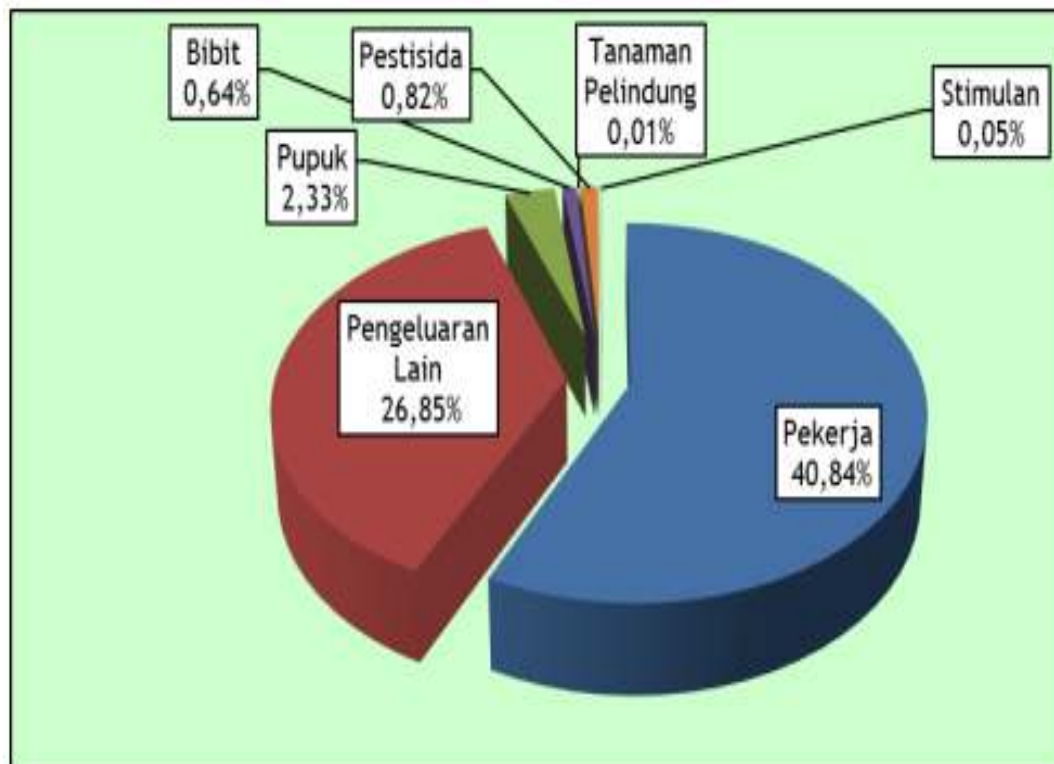
ini terjadi karena penjualan ke pabrik pengolahan tidak dibayar secara penuh, tetapi menunggu waktu pelunasan selama 3 minggu. Oleh karena itu pada saat petani membutuhkan uang tunai untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, mereka dengan terpaksa menjual kepada pedagang perantara (pengumpul), tentunya dengan harga yang lebih rendah bila dibandingkan kalau menjual melalui UPPB.

4.4. Komponen Biaya Produksi untuk Perkebunan Karet

Peningkatan efektivitas dan efisiensi di bidang pembiayaan dan keuangan merupakan upaya penggunaan dana yang seefektif dan seefisien mungkin agar biaya produksi karet cukup rendah sehingga harga karet alam bisa bersaing di pasar. Dengan demikian, produk karet itu mampu bersaing pada setiap tingkat harga jual yang terjadi di pasar. Jika faktor mutu merupakan salah satu kekurangan untuk bersaing dalam merebut minat pembeli, maka faktor harga pokok merupakan tolok ukur kemampuan petani karet untuk mengendalikan biaya yang berkaitan langsung dengan harga jual.

Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan pada saat karet mulai menghasilkan, seperti biaya sadap, biaya perawatan, biaya pemrosesan, dan biaya pengolahan. Dalam perhitungan biaya disertakan pula biaya tenaga kerja, sarana dan prasarana, termasuk didalamnya biaya investasi modal.

Menurut data Pusdatin (2016) secara umum hasil usaha tanaman karet di Indonesia untuk setiap 100 pohon akan menghasilkan nilai produksi sebesar Rp. 2.316.000,-. Jika dibandingkan dengan pengeluaran/biaya produksi, maka usaha karet ini masih cukup menguntungkan. Jumlah pengeluaran untuk usaha budidaya tanaman karet ini adalah sebesar Rp. 1.657.000,- juta, sehingga keuntungan untuk setiap 100 pohon karet adalah sebesar Rp. 659.390,-. Total pengeluaran untuk biaya usaha tani karet ini sebesar 71,54% dari nilai produksi. Secara grafik biaya Usaha Tanaman Karet dapat digambarkan berikut ini.



Sumber: Pusdatin (2016)

Gambar 2. Persentase Biaya terhadap Nilai Produksi Usaha Tanaman Karet

Secara konseptual, dalam perhitungan harga pokok, biaya yang dikeluarkan terdiri dari biaya bahan baku (*raw materials cost*), biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Biaya bahan baku (*raw materials cost*) adalah biaya yang digunakan untuk bahan-bahan yang bisa dengan mudah dan langsung diidentifikasi dengan barang jadi. Contoh bahan baku adalah biaya bibit karet. Definisi Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya untuk tenaga kerja yang secara langsung menangani proses produksi atau bisa dihubungkan langsung dengan barang jadi. Contoh tenaga kerja langsung adalah upah sadap karet. Pengertian Biaya overhead pabrik adalah biaya pabrik selain daripada bahan baku dan tenaga kerja langsung yang dapat diatribusikan dengan produk yang dihasilkan. Jadi biaya ini tidak dapat diidentifikasi langsung dengan barang yang dihasilkan. Contoh Biaya overhead pabrik adalah:

1. Bahan pembantu, sering juga disebut dengan bahan tidak langsung (*indirect materials*). Contohnya: pisau sadap, mangkuk penampungan karet.
2. Tenaga kerja tidak langsung (*indirect labor*), adalah tenaga kerja yang tidak dapat diidentifikasi langsung dengan barang yang dihasilkan dengan tugas atau pekerjaannya. Contohnya upah pengawas/mandor.

Berikut ini disajikan perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani karet:

Tabel 37. Perhitungan Biaya Produksi Petani Karet (Dalam Ha Per Tahun)

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
A	ALOKASI BIAYA BAHAN BAKU	
	Bibit Karet (termasuk penanaman)	15,000,000.00
	Umur karet : 25 tahun	600,000.00
	JUMLAH BIAYA BAHAN BAKU	600,000.00
B	BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG	
1	Upah Penyemprotan/Pemupukan	280,000.00
2	Upah Sadap	720,000.00
	JUMLAH BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG	1,000,000.00
D	BIAYA OVERHEAD	
	Bahan Pembantu	
1	Pupuk	637,500.00
2	Obat Semprot	1,200,000.00
3	Pisau Sadap	160,000.00
4	Mangkuk penampungan	850,000.00
5	Perlengkapan penyadapan lainnya	100,000.00
6	Pembekuan karet (Deorub)	84,000.00
	Jumlah Biaya Bahan Pembantu	3,031,500.00
	Tenaga Kerja Tidak Langsung	
	Upah harian lapangan	2,400,000.00
	Jumlah Tenaga Kerja Tidak Langsung	2,400,000.00
	JUMLAH BIAYA OVERHEAD	5,431,500.00
E	TOTAL BIAYA	7,031,500.00
	Produktivitas karet	917.00
	Biaya Produksi per kg	7,667.94

Sumber: Data Diolah, 2017

Tabel tersebut menunjukkan bahwa biaya pokok produksi karet yang sebesar Rp7.667,94 atau dibulatkan menjadi Rp7.668 per kg. Tentunya harga pokok ini belum termasuk biaya lainnya jika ada seperti biaya bunga atas pinjaman untuk pembelian lahan perkebunan, biaya pemasaran jika ada serta biaya lainnya. Biaya pokok produksi ini menjadi

acuan standar untuk menentukan harga jual yang layak dengan margin keuntungan yang diharapkan oleh petani. Berikut ini merupakan skenario harga jual yang bisa menjadi panduan bagi petani dalam menjual hasil karetnya.

Tabel 38. Harga Jual Karet Per Kg Dengan Pilihan Margin Keuntungan Bagi Petani

KETERANGAN		JUMLAH (Rp)		
HARGA POKOK PRODUKSI		7,668		
MARGIN KEUNTUNGAN		HARGA JUAL		
5%	X	8.071,57	403,6	8.071,57
10%		8.520,00	766,79	8.520,00
15%		9.021,17	1.150,19	9.021,17
20%		9.585,00	1.533,59	9.585,00
25%		10.224,00	1.916,98	10.224,00

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2017

4.4.1. Harga Karet Tingkat Petani dan Tingkat Pabrik Tahun 2017 di Kabupaten Balangan

Berdasarkan hasil survei ke petani karet menunjukkan bahwa pada bulan September tahun 2017 harga bokar dalam bentuk lum menunjukkan sebagai berikut:

Tabel 39. Harga Bokar pe Kg pada Bulan September Tahun 2017

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Rp. 5000	30	20.0	20.0	20.0
Rp. 6000	75	50.0	50.0	70.0
Rp. 7000	21	14.0	14.0	84.0
lainya, tuliskan	24	16.0	16.0	100.0
Total	150	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, Tahun 2017

Menurut responden, pada bulan September 2017 harga bokar berkisar Rp5.000 sampai Rp7.000, sebagian besar responden yaitu dari 150 responden, 75 atau 50% menyampaikan bahwa harga bokar sebanyak Rp6.000 per kg dan sebanyak 24 responden atau 16% yang menjual bokar di atas harga Rp7000 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 40. Harga Bokar Tingkat Petani Menurut Responden yang Menjual pada Bulan September 2017 Lebih dari Rp7.000

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Lebih dari Rp. 7.000 s/d Rp. 8.000	13	54.2	54.2	54.2
Lebih dari Rp. 8.000 s/d Rp. 9.000	7	29.2	29.2	83.3
Lebih dari Rp. 9.000 s/d Rp. 10.000	2	8.3	8.3	91.7
Lebih dari Rp. 12.000 s/d Rp. 13.000	2	8.3	8.3	100.0
Total	24	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa dari 24 responden yang menjual bokar pada bulan September 2017, sebanyak 13 responden atau 54,2% menjual pada kisaran harga Rp7.000 sampai RpRp8.000, sisanya antara Rp8.000 sampai Rp13.000.

Selanjutnya, harga bokar pada bulan Oktober 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 41. Harga Bokar pada Bulan Oktober 2017

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Rp. 5000	93	62.0	62.0	62.0
Rp. 6000	25	16.7	16.7	78.7
Rp. 7000	5	3.3	3.3	82.0
lainya, tuliskan	27	18.0	18.0	100.0
Total	150	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pada bulan Oktober sebagian besar petani karet yang menjadi responden menjual bokar dengan sebesar Rp5.000 yaitu sebanyak 93 responden atau 62% dari 150 responden yang menjadi sampel penelitian. Dengan demikian sebagian besar responden menjual bokar lebih rendah dari bulan sebelumnya, namun demikian masih ada yang menjual bokar diatas Rp7.000 yaitu sebanyak 27 responden atau 18% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42. Harga Jual Bokar pada Tingkat Pentani yang Menjual diatas Harga Rp7.000 pada Bulan Oktober 2017

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Lebih dari Rp. 7.000 s/d Rp. 8.000	16	59.3	59.3	59.3
Lebih dari Rp. 8.000 s/d Rp. 9.000	8	29.6	29.6	88.9
Lebih dari Rp. 9.000 s/d Rp. 10.000	2	7.4	7.4	96.3
Lebih dari Rp. 12.000 s/d Rp. 13.000	1	3.7	3.7	100.0
Total	27	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, 2017

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 16 responden dari 27 atau 59,3% yang menjual bokar pada bulan Oktober pada kisaran harga Rp7.000 sampai RpRp8.000.

Adapun harga jual bokar ke pabrik pengolahan selama bulan Januari sampai Agustus 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 43. Harga Jual Bokar pada Bulan Januari sampai Agustus 2017

BULAN	DESA KERUH	DESA MINDUIN	DESA LALAYAU	DESA SUNGAI PUMPUNG	DESA MUARA NINIAN	RATA-RATA
JAN	12.975	13.413	13.633	13.183	13.300	13.301
FEB	14.175	14.625	14.967	13.033	14.067	14.173
MAR	12.875	12.675	12.925	11.740	13.400	12.723
APR	11.350	9.925	10.575	9.950	11.550	10.670
MEI	10.133	9.375	9.850	8.730	9.800	9.578
JUNI	10.167	8.850	9.575	7.550	9.250	9.078
JULI	9.433	9.400	9.200	7.943	9.250	9.045
AGUSTUS	9.659		9.600	8.175	9.600	9.259
RATA-RATA	11.346	11.180	11.291	10.038	11.277	10.978

Sumber: Dinas Pertanian 2017

Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata harga jual Bokar ke pabrik pengolahan selama bulan Januari sampai Agustus 2017 sebesar Rp10.978.

4.4.2. Perhitungan Margin Keuntungan Petani

Pemahaman tentang margin keuntungan petani sangat penting untuk mengetahui tingkat keuntungan yang layak atas penjualan bokar di tingkat petani. Perhitungan margin keuntungan yang diperoleh petani dapat dihitung sebagai berikut:

Rata-rata Harga Jual ke Pabrik Pengolahan	= Rp10.978
Harga Pokok Produksi Bokar	= <u>Rp 7.668</u>
Selisih keuntungan yang diperoleh pedagang perantara	= Rp 3.310

Selisih harga tersebutlah yang menjadi bagian antara petani dan pedagang perantara yang sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar atau tarik menarika antara pembeli dan penjual. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa petani berada pada posisi yang lemah dalam hal tawar menawar. Dengan kata lain harga bokar lebih banyak ditentukan oleh pedagang perantara, sehingga sering merugikan petani.

Selisih keuntungan yang diperoleh pedagang perantara sebesar Rp3.310 tersebut, menggunakan harga pokok produksi. Namun jika dibandingkan dengan kisaran harga jual pada tingkat petani karet berdasarkan hasil survey pada bulan Oktober dan September 2017 yaitu dengan harga Rp 5.000 dan Rp6.000, maka margin keuntungan berkisar antara Rp4.978 sampai Rp5.978.

Selanjutnya, untuk memberikan rujukan data perbandingan, berikut ini disajikan besarnya harga bokar yang diharapkan oleh petani untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diharapkan.

Tabel 44. Tabel: Harga Bokar yang Diharapkan Petani

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Rp. 7000	18	12.0	12.0	12.0
lainya, tuliskan	132	88.0	88.0	100.0
Total	150	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, 2017

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 132 responden atau 88% mengharapkan harga bokar di tingkat petani diatas harga Rp7.000 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 45. Rincian Harga Bokar pada Tingkat Petani yang Diharapkan diatas Rp7.000

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Rp. 8.000	42	31.8	31.8	31.8
Rp. 9.000	21	15.9	15.9	47.7
Rp.10.000	56	42.4	42.4	90.2
Rp. 12.000	4	3.0	3.0	93.2
lebih dari Rp.12.000	9	6.8	6.8	100.0
Total	132	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, 2017

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 56 responden atau 42,4% mengharapkan harga karet sebesar Rp10.000 atau secara keseluruhan, sebanyak 119 responden atau 90,2% yang mengharapkan dapat menjual karet pada kisaran harga Rp8.000 sampai Rp10.000. Keinginan petani tersebut sangat masuk akal jika dibandingkan dengan perhitungan biaya

pokok produksi sesuai dengan hasil perhitungan pada tabel sebelumnya yaitu sebanyak Rp 7.668 per kg.

4.5. Program Keberpihakan Pemerintah yang diharapkan petani

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada petani karet dalam meringankan kebutuhan pokok mereka dengan dengan memberikan berbagai fasilitasi keberlangsungan usaha karet yang selama ini harganya selalu berfluktuasi. Berdasarkan hasil survey di lapangan mengenai fasilitasi yang diberikan pemerintah terhadap petani karet memberikan jawaban yang bervariasi. Berikut ini persepsi dan harapan para petani karet terhadap program dan kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan para petani karet.

Tabel 46. Tanggapan Responden Mengenai Bantuan/Fasilitasi pemerintah untuk petani karet

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ya	59	39.3	39.3	39.3
Valid Tidak	91	60.7	60.7	100.0
Total	150	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan hasil survey terhadap responden penelitian diketahui bahwa baru 39,30% yang sudah merasakan adanya fasilitasi pemerintah daerah terhadap para petani karet, dan sebagian besar yaitu 60,70% para responden belum merasakan adanya fasilitasi terhadap perbaikan usaha petani karet. Kemudian bila ditanyakan fasilitasi seperti apa yang

diharapkan para petani untuk kemajuan pertanian karet. Sebagian besar memerlukan failistasi pupuk dari pemerintah daerah. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 47. Jenis Bantuan/fasilitasi yang diharapkan masyarakat untuk kemajuan petani karet.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Bantuan Permodalan	15	10.0	10.0	10.0
Pemberdayaan Petani	14	9.3	9.3	19.3
Penyuluhan	11	7.3	7.3	26.7
Pupuk	88	58.7	58.7	85.3
Lainya, tuliskan	22	14.7	14.7	100.0
Total	150	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, 2017

Pada tabel diatas sebanyak 58,7% mengahrapakan adanya bantuan pupuk untuk para petani karet, 14,70% bantuan lainnya. Bantuan lainnya yang diinginkan para petani dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 48. Jenis Bantuan/Fasilitasi Pemerintah Lainnya yang Diharapkan Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Bbit	17	77.3	77.3	77.3
Obat	4	18.2	18.2	95.5
Amplong / Tempat Karet	1	4.5	4.5	100.0
Total	22	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, 2017

Pada taeb1 di atas terlihat bahwa bagi petani yang menginginkan bantuan selain pupuk 77,70% menginginkan bantuan bibit karet yang berkualitas.

Pengendalian dan kepastian harga merupakan suatu yang diharapkan juga oleh para petani karet selain fasilitasi yang telah disebutkan diatas. Apabila pemerintah memiliki program untuk pengendalian harga, para petani menginginkan pemerintah memiliki koperasi yang dapat menyangga produksi karet dari petani dan dapat mengendalikan harga sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Tabel 49. Program pemerintahan daerah untuk menjaga kesetabilan harga karet yang diharapkan masyarakat.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Pemberdayaan dan pelatihan pengolahan karet agar menghasilkan kualitas yang baik	56	37.3	37.3	37.3
Pendirian Gudang agar petani bisa memanfaatkan penyimpana karet ketika harga turun	13	8.7	8.7	46.0
Valid Pendirian koperasi sehingga hasil panen bisa di beli koperasi dengan harga wajar	66	44.0	44.0	90.0
Pendirian Badan Usaha Daerah dalam bentuk Pabrik pengolahan karet sehingga tidak lagi menjual ke Pabrik di Kab. Lain	15	10.0	10.0	100.0
Total	150	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, 2017

Pada tabel diatas terlihat sebanyak 44% petani menginginkan adanya pendirian koperasi oleh pemerintah daerah sehingga hasil panen karet bisa dibeli dengan harga wajar, selain itu petani juga menginginkan

program pemerintah dalam bentuk pemberdayaan dan pelatihan pengolahan karet agar menghasilkan kualitas karet yang baik. Tawaran program pendirian/pembentukan badan usaha daerah maupun pendirian gudang hanya mendapat respon 10% dan 8.7% dari para petani yang menjadi responden penelitian.

Adanya harapan para petani karet ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan program pemerintah yang berpihak pada rakyat apalagi Kabupaten Balangan sebagai besar masyarakatnya mengelola pertanian karet, sehingga dengan keberpihakan ini dan program yang betul-betul dirasakan masyarakat akan menjadikan karet menjadi komoditas unggulan Kabupaten Balangan untuk waktu yang akan datang.

Tabel 50. Program yang Diharapkan Petani Karet di Kabupaten Balangan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pemberdayaan dan pelatihan pengolahan karet agar menghasilkan kualitas yang baik	56	37.3	37.3	37.3
Pendirian Gudang agar petani bisa memanfaatkan penyimpanan karet ketika harga turun	13	8.7	8.7	46.0
Pendirian koperasi sehingga hasil panen bisa di beli koperasi dengan harga wajar	62	41.3	41.3	87.3
Pendirian Badan Usaha Daerah dalam bentuk Pabrik pengolahan karet sehingga tidak lagi menjual ke Pabrik di Kab. Lain	11	7.3	7.3	94.7
Lainya, Tuliskan	8	5.3	5.3	100.0
Total	150	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, 2017

4.6. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini berimplikasi terhadap kebijakan dan praktis.

Implikasi kebijakan adalah:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada masa reformasi pengelolaan keuangan di pemerintahan adalah anggaran yang berbasis kinerja. Salah satu indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah adalah mempunyai memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya sesuai dengan usaha-usaha pokok yang dilaksanakan. Kebijakan tentang alokasi anggaran yang tepat dalam rangka peningkatan dan pengembangan perkebunan karet rakyat perlu mendapat perhatian yang serius dan mendapatkan prioritas pembangunan dalam bidang pertanian.
2. Berdasarkan fakta bahwa harga karet di Kabupaten Balangan pada tingkat petani masih dibawah harga pokok produksi, maka diperlukana kebijakan yang tepat oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi antara petani dengan pabrik pengolahan karet sehingga masyarakat petani karet di Kabupaten Balangan memiliki posisi tawar yang kuat dalam hal pemasaran karet.
3. Sehubungan dengan hasil penelitian ini yang mengindikasikan adanya harapan yang tinggi dari para petani karet di Kabupaten Balangan untuk menjaga kestabilan harga karet, maka di perlukan kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengakomodir harapan petani karet tersebut dalam bentuk pendirian koperasi sebagai wadah para petani

karet untuk bisa memasarkan karetnya agar lebih terorganisir dengan baik dengan tetap memperhitungkan kualitas karet sesuai dengan permintaan konsumen.

Adapun implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah:

1. Pendirian lembaga yang dapat mewadahi petani karet di Kabupaten Balangan untuk menjaga kestabilan harga, berimplikasi terhadap penyiapan sumber daya yang tepat, baik sumberdaya manusia maupun sumber daya sarana dan prasarana dengan kualitas yang baik.
2. Sehubungan dengan poin 1 tersebut, suntikan dana dari berbagai pihak yang terkait seperti anggota koperasi, pemerintah daerah, perusahaan, dan sumber dana lainnya menjadi sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup lembaga tersebut. Transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian dari komitmen manajemen lembaga untuk dapat memberikan jaminan kualitas pengelolaannya.
3. Pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat petani karet secara terus-menerus menjalin kerjasama yang baik dengan para pengusaha bidang pengolahan karet untuk selalu memberikan kontribusi yang saling menguntungkan sebagaimana layaknya hubungan baik antara produsen dan konsumen.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, disimpulkan beberapa hasil temuan sebagai berikut:

1. Petani karet di Kabupaten Balangan menjual hasil produksi karet berupa bokar dalam bentuk lum melalui pedagang perantara dengan 3 cara, yaitu a) petani menjual ke pengumpul dengan menggunakan mobil kemudian dijual ke pabrik pengolahan; b) petani menjual kepada pengumpul kecil kemudian ke pengumpul dengan mobil selanjutnya ke pengumpul besar dan akhirnya ke pabrik pengolahan, dan c) petani menjual kepada UPPB selanjutnya ke pabrik pengolahan.
2. Biaya produksi yang diidentifikasi dalam produksi bokar petani karet sebesar Rp 7.668 per kg. Harga bokar berupa lum di tingkat produsen (petani karet) belum sebanding dengan biaya produksi yang seharusnya diperhitungkan dalam pemaaran karet.
3. Harga bokar pada bulan September 2017 berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa sebanyak 75 dari 150 esponden atau 50% menjual bokar dengan harga Rp6.000 lebih rendah dari biaya produksi yang layak diperhitungkan dalam penjualan bokar. Demikian pula

dengan penjualan bokar pada bulan Oktober 2017, sebanyak 62% responden menjual dengan harga Rp5.000.

4. Harga bokar yang dijual oleh UPPB berdasarkan data dari Dinas Pertanian pada kurun waktu Januari sampai Agustus 2017 rata-rata sebesar Rp10.978. Dengan demikian, selisih harga pembelian dari petani dengan penjualan ke pabrik pengolahan sebesar Rp3.310,-.
5. Harga bokar yang diharapkan petani karet di Kabupaten Balangan berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa dari 150 responden, sebanyak 132 responden atau 88% mengharapakan harga bokar di tingkat petani diatas harga Rp7.000. Sebanyak 56 responden dari 132 tersebut atau 42,4% mengharapakan harga karet sebesar Rp10.000. dengan demikian secara keseluruhan, sebanyak 119 responden atau 90,2% yang mengharapakan dapat menjual karet pada kisaran harga Rp8.000 sampai Rp10.000.

5.2. Rekomendasi

Sehubungan dengan simpulan penelitian, beberapa hal yang dapat direkomendasikan yaitu:

1. Diperlukan langkah nyata dari pemerintah daerah Kabupaten Tabalong untuk mencari soslusi yang tepat dalam memfasilitasi petani karet memasarkan hasil karet dalam menjaga kestabilan harga.

2. Sehubungan dengan rekomendasi 1, rekomendasi selanjutnya adalah menindaklanjuti harapan masyarakat petani karet yang begitu besar untuk membentuk suatu lembaga berupa koperasi.
3. Diperlukan kesiapan semua pihak baik dari pemerintah daerah maupun petani karet untuk meningkatkan kualitas sumber daya agar koperasi yang diidamkan oleh masyarakat dapat berjalan dengan baik sehingga mendapat jaminan bahwa lembaga tersebut mampu mengakomodir keinginan petani karet selama ini.
4. Perusahaan pengolahan karet melalui pendekatan yang tepat oleh pemerintah daerah diharapkan memberikan kontribusinya untuk ikut serta dalam membina petani karet di Kabupaten Balangan sehingga terjalin sinergi antara petani karet sebagai produsen dan perusahaan sebagai konsumen untuk meningkatkan pendapatan.
5. Koordinasi sangat diperlukan kepada instansi terkait untuk memberikan prioritas yang tinggi dalam pengalokasian anggaran sehubungan dengan pemberdayaan petani karet untuk selalu meningkatkan kualitas produksinya agar mampu meningkatkan posisi tawar dengan perusahaan pengolahan karet.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, 2005. Pengertian Abstrak Kehilangan Hasil pada Tanaman Perkebunan. [http : // Agribisnis, deptan.go.id](http://Agribisnis.deptan.go.id)

Anonimous, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-Dag/Per/7/2016 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis yang diperdagangkan (Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2016)

Anonimous, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permenta/OT.140/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Jakarta: Kementerian Pertanian, 2008)

Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016. Statistik Perkebunan Indonesia Komuditas Karet 2015-2017

Gode, J.W., 1985. Sosiologi Keluarga. Bina Aksara, Jakarta.

Kotler, Philip, 2003. Manajemen Pemasaran, Jilid 1, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.

Malian, Husni dan Aman Djauhari, 1999. Upaya Perbaikan Kualitas Bahan Olah Karet

Mustafid, 2002. Analisis Efektifitas dan Efesiensi Tataniaga Kopi Biji di Provinsi Lampung, fakultas UNILA Lampung.

Rakyat. Forum Agro Ekonomi, Volume 17(02): 38-45.

Scott, J.J., 1989. Moral Ekonomi Petani. LP3ESD, Jakarta.

Soekartawi, 1989. Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran Hasil-hasil Pertanian, Teori dan Aplikasinya, Rajawali Press, Jakarta.

Soekartawi, 1995. Analisis Usahatani, Penerbit UI-Press, Jakarta.

Sudiyono, A., 2004. Pemasaran Pertanian, Penerbit UMM- Malang.

Tim Penulis PS, 2013. Panduan Lengkap Karet. Penerbit: Penerbar Swadaya. Jakarta.

Wolf, E., 1983. Petani Suatu Tinjauan Antropologi. Rajawali, Jakarta.